



# LAPORAN KINERJA

TAHUN 2018

**BIRO KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN**  
*SEKRETARIAT JENDERAL & BADAN KEAHLIAN*  
*DEWAN PERWAKILAN RAKYAT*  
*REPUBLIK INDONESIA*

©Biro Kerja Sama Antar-Parlemen Setjen & BK DPR RI 2019

Biro Kerja Sama Antar Parlemen adalah unit di Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerja sama antar parlemen dan layanan alih bahasa.

Lebih lanjut lihat [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

Semua pertanyaan tentang hak dan izin, termasuk hak-hak tambahan sekaligus saran dan masukan dialamatkan ke:

Sekretariat Biro Kerja Sama Antar-Parlemen  
Sekretariat Jenderal DPR RI  
Gedung Nusantara III Lantai 4  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270 Indonesia

Telepon: 021-5715907, 5715814, 5715807

Fax: 021-5734460

Email: [biro\\_ksap@dpr.go.id](mailto:biro_ksap@dpr.go.id)

# KATA PENGANTAR

**Endah TD Retnoastuti**  
**Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen**

.....

*“Peran diplomasi parlemen yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPR RI, mendapat apresiasi dari dunia internasional. Tugas Sekretariat adalah memastikan peran tersebut berjalan dengan baik dan mendapat dukungan penuh baik dari sisi teknis maupun keahlian.”*

Alhamdulillah Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 telah diselesaikan pada waktunya. LAKIP ini adalah instrumen pertanggungjawaban terkait tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi sekaligus tolok ukur penggunaan anggarannya.

Dengan LAKIP ini Biro KSAP dapat mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Biro dan terdorong untuk menyelenggarakan tugas dukungan terhadap Dewan secara lebih baik, sesuai ketentuan, peraturan perundang undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sejalan juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *goal* ke 16, mengenai akuntabilitas untuk pemerintahan yang baik, dengan mengukur sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar telah dilaksanakan.

Dengan meningkatnya kegiatan DPR dalam menjalankan peran *dual track diplomacy*, semoga di tahun 2019, dimasa akhir periode DPR 2014-2019, kinerja Biro KSAP semakin meningkat dan akuntabel serta meningkat pula kemanfaatan yang dirasakan oleh Dewan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Masukan dan saran baik mengenai dukungan Biro Kerjasama Antar Parlemen kepada Dewan maupun tentang penulisan LAKIP ini sangat diharapkan.

Terima kasih.

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

---

**U**ntuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, telah ditetapkan peraturan antara lain Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi. Peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari Sistem AKIP yang dilaksanakan secara berjenjang pada setiap instansi Pemerintahan, mulai dari Eselon II hingga Eselon I, sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun dan juga sebagai dasar evaluasi untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sesuai dengan Peraturan Sekjen Nomor 400 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Setjen DPR RI yang telah disempurnakan dengan Peraturan Sekjen Nomor 3 Tahun 2010 dan diperbaharui lagi dengan peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, menempatkan Biro Kerja Sama Antar Parlemen berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Deputy Bidang Persidangan.

Biro KSAP memiliki dua tugas utama yaitu menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerjasama antar parlemen dan layanan alih bahasa. Dalam melaksanakan tugasnya itu, Biro KSAP memiliki fungsi yaitu Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Kerja Sama Antar Parlemen; Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Kerja Sama Antar Parlemen; Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen; Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen; Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persidangan Badan Kerja Sama Antar Parlemen; Pelaksanaan kebijakan di bidang persidangan Badan Kerja Sama Antar Parlemen; Penyelenggaraan persidangan kerjasama organisasi internasional dan dukungan analisis terhadap isu internasional; Penyelenggaraan persidangan kerjasama organisasi regional dan dukungan analisis terhadap isu regional; Penyelenggaraan

persidangan kerjasama bilateral dan dukungan analisis terhadap isu bilateral; Penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Penyelenggaraan dukungan alih bahasa; Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Persidangan; Penyusunan laporan kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen; dan Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

Sesuai Rencana Strategis Biro KSAP tahun 2015-2019 yaitu Terwujudnya Dukungan Kegiatan Kerja Sama Antar Parlemen Yang Berkualitas, Profesional Dan Akuntabel, maka ditetapkanlah tujuan yaitu Meningkatkan hasil analisis isu-isu bilateral, regional dan internasional yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi BKSAP dan meningkatkan dukungan teknis, administrasi dan alih bahasa yang berkualitas dan tepat waktu.

Untuk tahun 2018, Biro KSAP menetapkan sasaran kinerja untuk satuan kerja sekretariat Jenderal (Satker Setjen) berupa dokumen materi kerjasama antar parlemen sebanyak 26 dokumen yang terdiri dari 3 dokumen Bahan Kebijakan Biro Kerja Sama Antar Parlemen, 5 dokumen Materi Kerja Sama Organisasi Internasional, 5 dokumen Materi Kerja Sama Organisasi Regional, 5 dokumen Materi Kerja Sama Bilateral dan 5 dokumen Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota serta 2 dokumen kunjungan delegasi Setjen DPR RI ke sidang Internasional. Sedangkan untuk Satuan Kerja Dewan (Satker Dewan) telah ditetapkan sasaran kinerja Layanan Sidang/Konferensi didalam negeri sebanyak 3 kali, Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri sebanyak 58 kali dan Layanan Pelaksanaan Peran Diplomasi Anggota DPR RI sebanyak 250 Anggota.

Capaian kinerja keuangan Biro KSAP pada tahun 2018 untuk Satker Setjen mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,6%, dengan nilai capaian pada tahun 2018 sebesar 94,4%, sedangkan pada tahun 2017 capaiannya sebesar 100%. Adapun untuk Satker Dewan, capaian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 27.73% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan nilai capaian pada tahun 2018 sebesar 81.67%, sedangkan pada tahun 2017 capaiannya hanya 109.4 %.

Penurunan capaian kinerja keuangan Biro KSAP tersebut lebih disebabkan karena faktor eksternal yaitu Kebijakan dan kesibukan Anggota DPR RI baik dengan kegiatannya di komisi maupun alat kelengkapan Dewan lainnya, maupun kegiatannya di Daerah Pemilihan, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang telah direncanakan batal terlaksana, terutama dalam kegiatan diplomasi individu DPR RI. Kendati demikian, semua kegiatan tersebut telah

didukung sepenuhnya oleh Biro KSAP. Keberhasilan Biro KSAP dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2018 tidak lepas dari dukungan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia dan dukungan anggaran serta sarana dan prasana yang tersedia. Kendati demikian, dalam mewujudkan dukungan yang berkualitas, andal dan professional, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal kurangnya kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara, dukungan teknologi dan sarana/prasarana yang kurang memadai, distorsi atas perencanaan / pelaksanaan serta masih lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Biro KSAP telah melakukan upaya antara lain dengan menyampaikan permintaan kebutuhan pegawai kepada unit kerja terkait, meminta pendidikan dan pelatihan untuk pegawai di lingkungan Biro KSAP, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi terkait website dan intranet serta data base kunjungan luar negeri, melakukan rapat-rapat koordinasi baik internal maupun dengan pihak-pihak terkait.

## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kelembagaan .....	2
C. Struktur Organisasi .....	3
D. Sumber Daya Manusia .....	4
E. Aspek Strategis Organisasi .....	7
F. Sistematika Penyajian .....	8
<b>BAB II</b> RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA .....	11
A. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan .....	11
B. Penetapan Kinerja Tahun 2018 .....	13
<b>BAB III</b> AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
A. Pengukuran Capaian Kinerja .....	17
B. Evaluasi dan Analisis Capaian .....	21
C. Capaian Kinerja Anggaran .....	42

<b>BAB IV</b>	PENUTUP .....	48
	A. Keberhasilan .....	48
	B. Hambatan dan Masalah .....	48
	C. Pemecahan Masalah .....	50

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Biro KSAP Tahun 2018 .....	14
Tabel 2	Capaian Kinerja Biro KSAP Tahun 2018 .....	17
Tabel 3	Perbandingan Capaian Kinerja Biro KSAP Tahun 2017 dan Tahun 2018	19
Tabel 4	Data Output Dukungan dalam Sidang-sidang Internasional Tahun 2018 .....	34
Tabel 5	Data Output dukungan Kegiatan Biro KSAP dalam Sidang-sidang Regional Tahun 2018 .....	35
Tabel 6	Data Output Dukungan Kegiatan Biro KSAP dalam Kerjasama Bilateral Tahun 2018 .....	38
Tabel 7	Data Output Dukungan Kegiatan Biro KSAP dalam Kegiatan Rapat-rapat Courtesy Call, Friendly Talk BKSAP DPR RI Tahun 2018 .....	39
Tabel 8	Data Output Dukungan Kegiatan Biro KSAP dalam Diplomasi Individu DPR RI Tahun 2018 .....	40
Tabel 9	Data Output Kegiatan Alih Bahasa/Penerjemahan lisan dan tertulis ....	41
Tabel 10	Data Persandingan Usulan Anggaran BKSAP 2018 .....	43
Tabel 11	Realisasi Anggaran Tahun 2018 .....	44

## **DAFTAR GAMBAR**

---

Gambar 1	Struktur Organisasi Biro KSAP .....	4
Gambar 2	Grafik Data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Biro KSAP Tahun 2018	5
Gambar 3	Grafik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Biro KSAP berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2018 .....	6
Gambar 4	Grafik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Biro KSAP berdasarkan Golongan Tahun 2018 .....	6
Gambar 5	Indikator Kinerja sasaran “Tersedianya Dokumen Materi Kerjasama Antar Parlemen” .....	22

# BAB I

## PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kelembagaan

Struktur Organisasi

Sumber Daya Manusia

Aspek Strategis Organisasi

Sistematika Penyajian

---

**PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 Pasal 20A ayat (1), DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang diatur selengkapannya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas DPR RI tersebut dan sesuai perubahan struktur dan ketatalaksanaan Setjen DPR RI sebagaimana diamanatkan oleh UU MD3 tersebut telah dilaksanakan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI). Setjen dan BK DPR RI adalah aparatur pemerintah yang didalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI.

Setjen DPR RI mempunyai tugas dan fungsi mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dibidang administrasi dan persidangan, dan BK DPR RI mempunyai tugas dan fungsi mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dibidang keahlian. Dalam pelaksanaan tugasnya, Setjen DPR RI dibantu Deputi Bidang Persidangan dan Deputi Bidang Administrasi. Biro Kerja Sama Antar Parlemen (Biro KSAP) adalah unit kerja dibawah Deputi bidang Persidangan.

Untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, telah dibentuk berbagai peraturan seperti Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Sekjen DPR RI No. 400 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Setjen DPR RI yang telah disempurnakan dengan Peraturan Sekjen No. 3 Tahun 2010 dan diperbaharui lagi dengan peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dimana Biro Kerja Sama Antar Parlemen berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Deputi Bidang Persidangan. Dari beberapa peraturan tersebut, dikemukakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kerja Sama Antar Parlemen tahun 2018 adalah bentuk akuntabilitas pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2018 dan sebagai evaluasi untuk perbaikan kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen di masa yang akan datang.

## **B. KELEMBAGAAN**

### **1. KEDUDUKAN**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 400/Sekjen/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekjen Nomor 3/PERSEKJEN/2010 dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2015, Biro Kerja Sama Antar Parlemen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Persidangan.

### **2. TUGAS POKOK**

Biro Kerja Sama Antar Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerjasama antar parlemen dan layanan alih bahasa.

### **3. FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Biro Kerja Sama Antar Parlemen menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
2. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
3. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen;

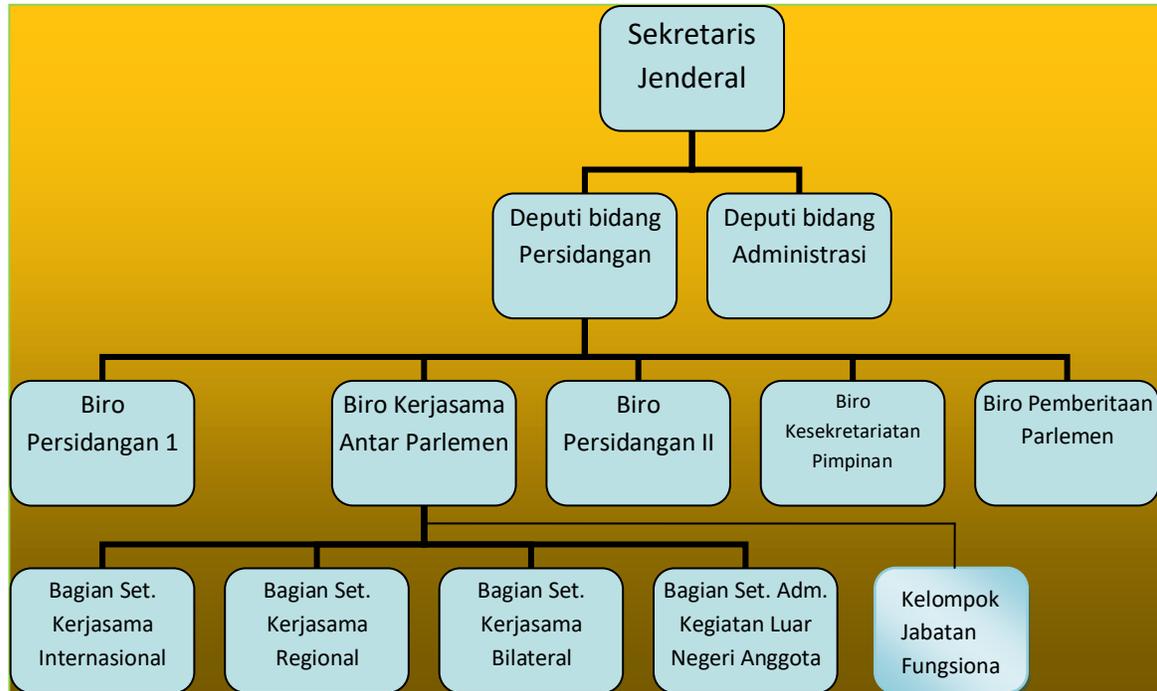
4. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persidangan Badan Kerja Sama Antar Parlemen;
6. Pelaksanaan kebijakan di bidang persidangan Badan Kerja Sama Antar Parlemen;
7. Penyelenggaraan persidangan kerjasama organisasi internasional dan dukungan analisis terhadap isu internasional;
8. Penyelenggaraan persidangan kerjasama organisasi regional dan dukungan analisis terhadap isu regional;
9. Penyelenggaraan persidangan kerjasama bilateral dan dukungan analisis terhadap isu bilateral;
10. Penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
11. Penyelenggaraan dukungan alih bahasa;
12. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputy Bidang Persidangan;
13. Penyusunan laporan kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen; dan
14. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputy Bidang Persidangan.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Biro Kerja Sama Antar Parlemen terdiri dari :

1. Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional (KSI).
2. Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional (KSR);
3. Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral (KSB);
4. Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (MINLUNA);
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

**GAMBAR 1**  
**STRUKTUR ORGANISASI BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN**



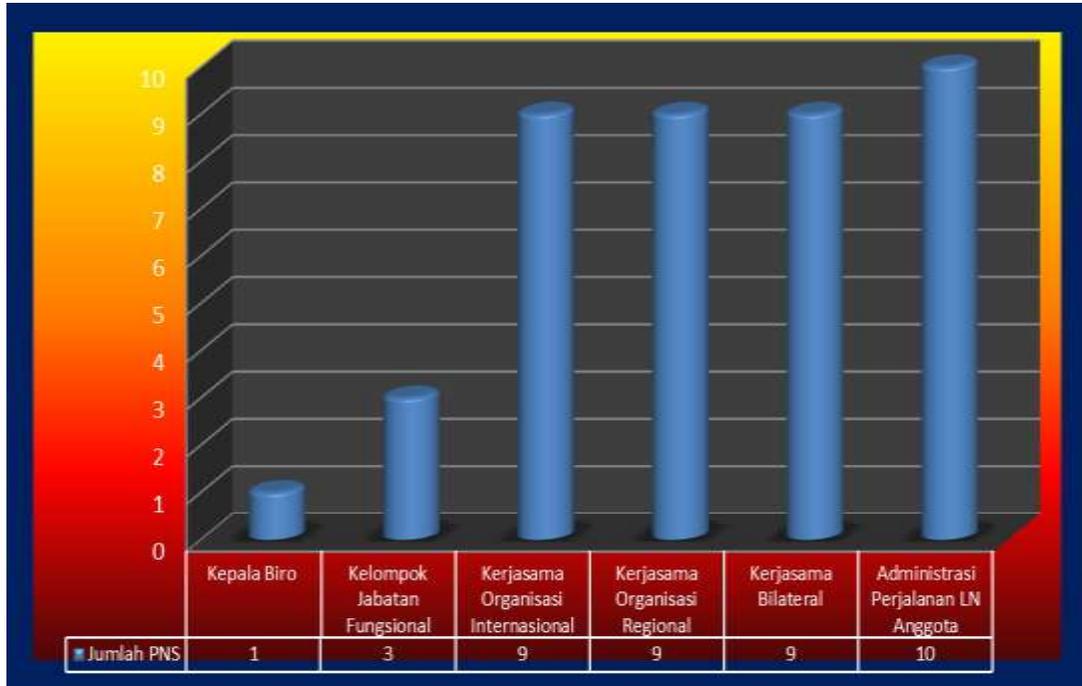
Sumber : Struktur Organisasi Setjen dan BK DPR RI tahun 2018

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA DI BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN**

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Biro Kerjasama Antar Parlemen berjumlah 41 orang, terdiri dari Kepala Biro dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di 4 unit kerja yaitu:

1. Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional (KSI).
2. Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional (KSR);
3. Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral (KSB);
4. Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (MINLUNA);

**Gambar 2**  
**Grafik Data PNS di lingkungan Biro KSAP Tahun 2018**



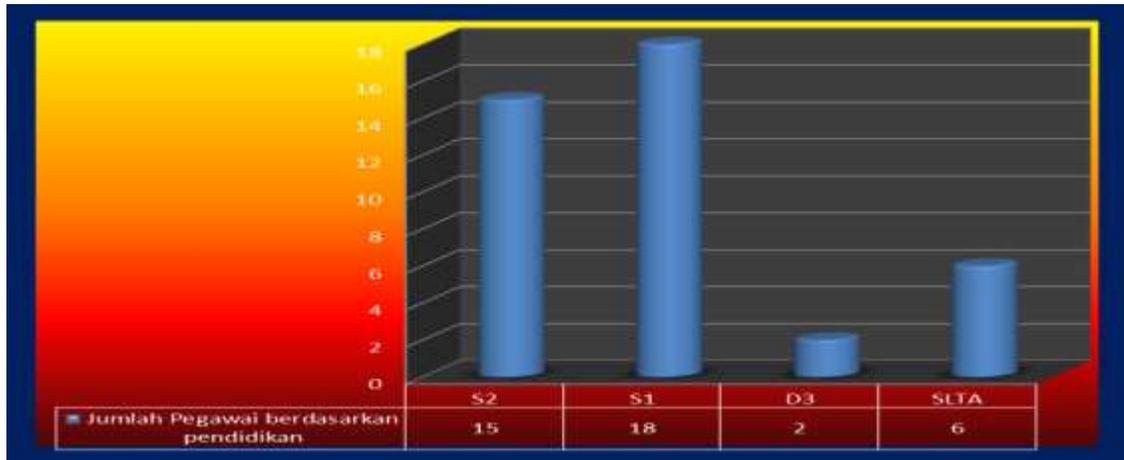
Sumber data : Bagian Kepegawaian Setjen dan BK DPR RI per 31 Desember 2018

Disamping Pegawai Negeri Sipil, Biro Kerjasama Antar Parlemen juga didukung dengan 9 orang Tenaga Ahli yang memberikan dukungan dalam hal substansi dan keahlian kepada Anggota BKSAP.

Dalam hal kualitas, BKSAP didukung dengan pegawai yang semakin tahun semakin meningkat latar belakang pendidikannya. Tahun 2018, terdapat 15 PNS yang memiliki latar pendidikan S2, 18 orang PNS merupakan lulusan S1, 2 orang PNS lulusan D3 dan 6 orang PNS lulusan SLTA. Dengan latar belakang pendidikan yang semakin tinggi diharapkan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas masing-masing semakin meningkat dan berkualitas, memiliki kemampuan manajerial yang semakin baik, berkoordinasi, komunikasi dan beradaptasi terhadap perubahan organisasi juga semakin mumpuni. Berikut ini tabel pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:

**Gambar 3**

**Grafik data PNS di lingkungan Biro KSAP berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018**

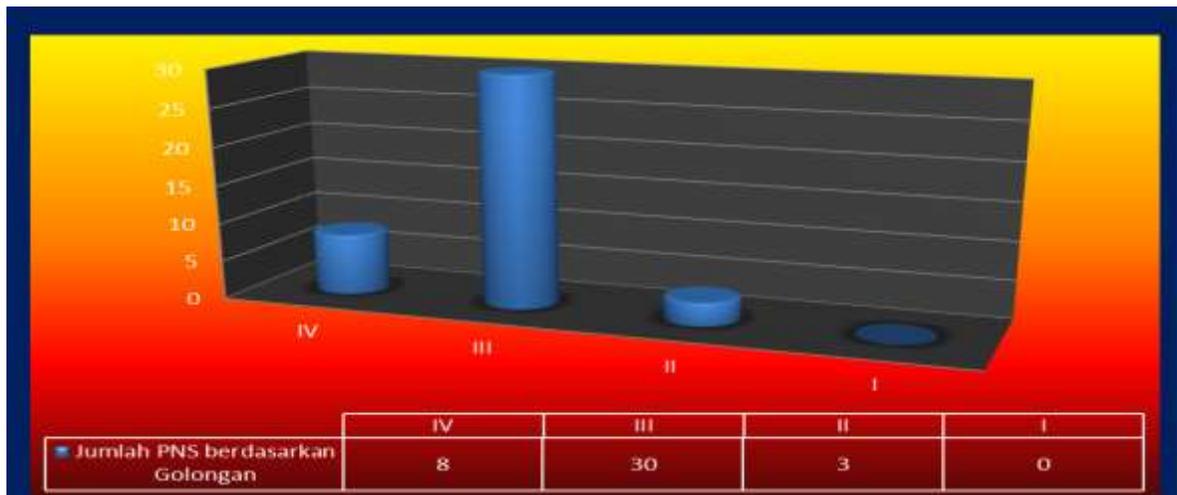


Sumber : Data Bagian Kepegawaian Setjen dan BK DPR RI per 31 Desember 2018

Berdasarkan Golongan, Biro KSAP memiliki pegawai yang mayoritas golongan III, hal ini berarti bahwa masa kerja dan pengalaman serta kemampuan PNS di lingkungan Biro KSAP sudah baik. Sedangkan PNS Golongan I di Biro KSAP sudah tidak ada, dan untuk mengisi pekerjaan yang berkaitan dengan pengantaran surat dan penyajian jamuan rapat dilakukan oleh Pegawai honorer. Berikut ini grafik PNS di Lingkungan Biro KSAP berdasarkan golongan.

**Gambar 4**

**Grafik Data PNS di lingkungan Biro KSAP berdasarkan Golongan Tahun 2018**



Sumber : Data Bagian Kepegawaian Setjen dan BK DPR RI per 31 Desember 2018

## E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Melalui perencanaan organisasi, sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, administrasi serta dukungan teknis lainnya, Biro Kerja Sama Antar Parlemen mendukung dan memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan misi diplomasi Parlemen yang dilaksanakan oleh DPR RI.

Misi diplomasi DPR tersebut tidak saja melalui dialog atas berbagai isu-isu internasional dalam kerangka organisasi yang merangkum kerjasama keparlemenan dan kerjasama bilateral tetapi juga melalui pengawasan terhadap berbagai negosiasi internasional dan pelaksanaan berbagai kesepakatan yang sudah diadopsi oleh pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya, perjanjian-perjanjian internasional tersebut selalu mendahulukan kepentingan nasional, sejalan dengan norma dan hukum internasional dan menjunjung tinggi penegakan hukum di dalam negeri. Salah satu contohnya, dimana BKSAP DPR RI telah mengambil peran strategis misalnya di daerah perbatasan. Mengingat negara-negara di kawasan Pasifik menganut sistem parlementer, peran DPR RI dalam kerangka *multi-track diplomacy* menjadi signifikan guna menyampaikan pandangan dan sikap pemerintah serta rakyat Indonesia yang tetap mengutamakan kedaulatan NKRI. Masalah kemerdekaan Palestina dan kontribusi terhadap krisis kemanusiaan warga Rohingya di Myanmar, juga masih menjadi fokus diplomasi BKSAP tahun 2018, selain juga issue Pembangunan Berkelanjutan .

Berbagai keterlibatan DPR RI di kancah internasional tersebut didukung oleh Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP) sebagai bagian dari Kesekretariatan Jenderal dan Badan Keahlian yang memberikan dukungan teknis dan keahlian kepada Dewan.

Saat ini Biro KSAP bukan saja memberikan dukungan kepada anggota BKSAP yang berjumlah 50 orang, namun juga kepada Pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR RI yang berjumlah 560 orang melalui program Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) dan kunjungan diplomasi parlemen perorangan. Bukan itu saja, Biro KSAP juga memberi dukungan kepada anggota parlemen sedunia yang menjadi anggota *Global Parliamentarians against Corruption (GOPAC)* mengingat saat ini Indonesia menjadi markas besar dari organisasi tersebut. Pada tahun 2018 dengan diselenggarakannya *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* yang kedua di Bali pada bulan September 2018 atas inisiatif Indonesia, Biro KSAP menjadi sekretariat dari sidang tersebut dimasa mendatang.

## **F. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan laporan pencapaian kinerja Biro KSAP selama tahun 2018. Capaian kinerja 2018 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Bab I	PENDAHULUAN
	Menjelaskan secara ringkas latar belakang aspek strategis dan struktur organisasi.
Bab II	RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN PENETAPAN KINERJA
	Menjelaskan Rencana Strategis Biro KSAP tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017.
Bab III	AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja (mikro) Biro KSAP dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018.

#### Bab IV

#### PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas Kinerja Biro KSAP tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

# BAB II

## RENCANA STRATEGIS & PENETAPAN KINERJA

**Rencana Strategis dan  
Rencana Kinerja Tahunan**

**Penetapan Kinerja Tahun 2018**

## **RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA**

Biro Kerja Sama Antar Parlemen pada tahun 2018, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul, telah menyusun Rencana Strategis tahun 2015 - 2019 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

### **A. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan terhadap tiga fungsi DPR RI, program kerja Biro KSAP mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Persidangan dan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2015 – 2019 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

#### **1. Visi**

Rumusan visi dan misi Biro Kerja Sama Antar Parlemen mengacu pada visi dan misi Deputi Bidang Persidangan, dengan fokus pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, yaitu menyiapkan dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang Persidangan dan Kerja Sama antar Parlemen, sehingga visi Biro KSAP adalah:

**"TERWUJUDNYA DUKUNGAN KEGIATAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN YANG BERKUALITAS, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL"**

## 2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro KSAP, yaitu:

- a. Mewujudkan analisis isu-isu bilateral, yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat, serta alih bahasa yang akurat.
- b. Mewujudkan analisis isu-isu regional yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat.
- c. Mewujudkan analisis isu-isu internasional yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat.
- d. Mengembangkan Database yang akurat dan informasi terbaru untuk mendukung kegiatan kerja sama antar parlemen.

## 3. Tujuan

- a. Meningkatkan hasil analisis isu-isu bilateral, regional dan internasional yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi BKSAP.
- b. Meningkatkan dukungan teknis, administrasi dan alih bahasa yang berkualitas dan tepat waktu.

Dengan mengacu pada tujuan tersebut, Biro KSAP dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

## 4. Sasaran

- 1) Sasaran yang menggunakan anggaran satker setjen yaitu  
**“Tersedianya Dokumen Materi Kerjasama Antar Parlemen”**

Dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Jumlah Bahan Kebijakan Biro Kerjasama Antar Parlemen (KSAP)
2. Jumlah Materi Kerja Sama Organisasi Internasional

3. Jumlah Materi Kerja Sama Organisasi Regional
  4. Jumlah Materi Kerja Sama Bilateral
  5. Jumlah Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota
  6. Jumlah Kunjungan Delegasi Setjen DPR RI ke sidang Internasional
- 2) Sementara untuk sasaran yang menggunakan satker dewan adalah :
1. Layanan Sidang/Konferensi di dalam negeri.  
Dengan indikator : jumlah penyelenggaraan konferensi/seminar regional/internasional
  2. Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri.  
Dengan indikator : Jumlah keikutsertaan DPR RI di Organisasi Regional/Internasional dalam rangka diplomasi parlemen
  3. Layanan Pelaksanaan Peran Diplomasi Anggota DPR RI.  
Dengan indikator : Jumlah Anggota DPR RI yang melaksanakan peran diplomasi parlemen

## **B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018**

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai

dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Biro KSAP telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Perjanjian kinerja Biro KSAP disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan. Substansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Perjanjian Kinerja adalah memuat sasaran-sasaran strategis Deputi Bidang Persidangan tahun 2015-2019. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Biro KSAP tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perjanjian Kinerja Biro Kerjasama Antar Parlemen Tahun 2018**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>Satker Setjen</b>			
<b>1.</b>	Tersedianya dokumen materi kerjasama antar parlemen	1. Jumlah Bahan Kebijakan Biro Kerja Sama Antar Parlemen	3 Dokumen
		2. Jumlah Materi Kerja Sama Organisasi Internasional	5 Dokumen
		3. Jumlah Materi Kerja Sama Organisasi Regional	5 Dokumen
		4. Jumlah Materi Kerja Sama Bilateral	5 Dokumen
		5. Jumlah Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota	5 Dokumen
		6. Jumlah kunjungan Delegasi Setjen DPR RI ke sidang Internasional	3 Dokumen
<b>Satker Dewan</b>			
<b>1.</b>	Layanan Sidang/konferensi di dalam negeri	Jumlah Penyelenggaraan Konferensi/ Seminar Regional/ Internasional	3 kali

2.	Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah keikutsertaan DPR di Organisasi Regional/Internasional dalam rangka diplomasi parlemen	58 kali
3.	Layanan Pelaksanaan Peran diplomasi Anggota DPR RI	Jumlah Anggota DPR RI yang melaksanakan peran diplomasi parlemen	250 Anggota

Mengingat Biro KSAP secara anggaran bertanggung jawab untuk dua satuan kerja, yaitu satuan kerja dewan dan satuan kerja sekretariat, maka untuk sasaran program/kegiatan juga dibagi menjadi dua dengan indikator dan jumlah target yang berbeda.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

**Pengukuran Capaian Kinerja**

**Evaluasi dan Analisis Capaian**

**Capaian Kinerja Anggaran**

**A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Selama tahun 2018 Biro Kerja Sama antar Parlemen (KSAP) telah melaksanakan kegiatan dukungan terhadap fungsi Diplomasi Parlemen yang dilaksanakan oleh DPR RI. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan diarahkan berpedoman kepada Renstra Biro KSAP 2015 – 2019 .

Biro Kerjasama Antar Parlemen secara administrative menjadi PPK atas Anggaran Satker Setjen dan Satker Dewan. Untuk itu, LAKIP Biro KSAP tidak hanya menjelaskan mengenai capaian kinerja atas Satker Setjen, melainkan juga capaian kinerja dalam Satker Dewan. Dan sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran program/kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dengan gambaran capaian adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Capaian Kinerja Biro KSAP Tahun 2018**

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>Satker Setjen</b>				
Tersedianya Dokumen Kerjasama Parlemen Materi Antar	Jumlah Bahan Kebijakan Biro Kerjasama Antar Parlemen (KSAP)	3 Dokumen	3 dokumen	100 %
	Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Internasional	5 dokumen	5 dokumen	100 %

	Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Regional	5 dokumen	5 dokumen	100 %
	Jumlah Materi Kerjasama Bilateral	5 dokumen	5 dokumen	100 %
	Jumlah Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota	5 dokumen	5 dokumen	100 %
	Jumlah kunjungan Delegasi Setjen DPR RI ke sidang Internasional	3 dokumen	2 dokumen	66,6%
<b>Satker Dewan :</b>				
<b>Layanan Sidang/Konferensi di dalam negeri</b>	Jumlah Penyelenggaraan Konferensi/ Seminar Regional/Internasional	3 kali	3 kali	100%
<b>Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri</b>	Jumlah Keikutsertaan DPR di Organisasi Regional/Internasional dalam rangka diplomasi parlemen	58 kali	57 kali	98,2%
<b>Layanan Pelaksanaan Peran Diplomasi Anggota DPR RI</b>	Jumlah Anggota DPR RI yang melaksanakan peran diplomasi parlemen	250 Anggota	117 Anggota	46,8%

Dari table tersebut diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 capaian kinerja Satker Setjen telah terealisasi sebesar 100% untuk 5 indikator kinerjanya, sementara untuk indikator “Jumlah kunjungan Delegasi Setjen DPR RI ke sidang Internasional” tercapai 66,6%. Hal itu dikarenakan dari 3 kegiatan yang direncanakan, ada 2 kegiatan yang terealisasi.

Indikator ini merupakan indikator yang baru muncul di tahun 2018, pada tahun 2017 belum ada indikator ini.

Adapun untuk Satker Dewan untuk indikator kinerja Layanan Sidang/Konferensi didalam negeri telah mencapai target 100%, sedangkan indikator kinerja Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri telah mencapai 98,28%, dan untuk Layanan Pelaksanaan Peran Diplomasi Anggota DPR RI telah mencapai 46,80%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian kinerja untuk Satker Setjen dan Satker Dewan dapat digambarkan dalam table berikut ini:

**Tabel 3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Biro KSAP Tahun 2017 dan 2018**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			KENAIKAN	
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
<b>Satker Setjen :</b>								
1 Jumlah Bahan Kebijakan Biro Kerjasama Antar Parlemen (KSAP)	3 Dok	3 dok	100 %	3 dok	3 dok	100%	0%	
2 Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Internasional	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%	0%	
3 Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Regional	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%	0%	
4 Jumlah Materi Kerjasama Bilateral	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%	0%	
5 Jumlah Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%	0%	
6 Jumlah kunjungan Delegasi Setjen				3 dok	2 dok	66,6%		

DPR RI ke sidang Internasional								
Rata-rata capaian				100 %			94.4%	(5,6%)
TAHUN 2017				TAHUN 2018				KENAIKAN/ PENURUNAN
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
<b>Satker Dewan :</b>								
1	Jumlah Penyelenggaraan Konferensi/ Seminar Regional/Internasional	3 kali	3 kali	100%	3 konf	3 konf	100%	0%
2	Jumlah Keikutsertaan DPR di Organisasi Regional/Internasional dalam rangka diplomasi parlemen	48 kali	60 kali	125%	58 kali	57 kali	98,2%	(26,8%)
3	Jumlah Anggota DPR RI yang melaksanakan peran diplomasi parlemen	220 Anggota	227 Anggota	103.2%	250 Anggota	117 Anggota	46,8%	(56,2%)
	Rata-rata capaian			109.4%			81.67%	(27.73)%

## **B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA**

Berdasarkan Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2018 maka dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. SATKER SETJEN**

#### **SASARAN**

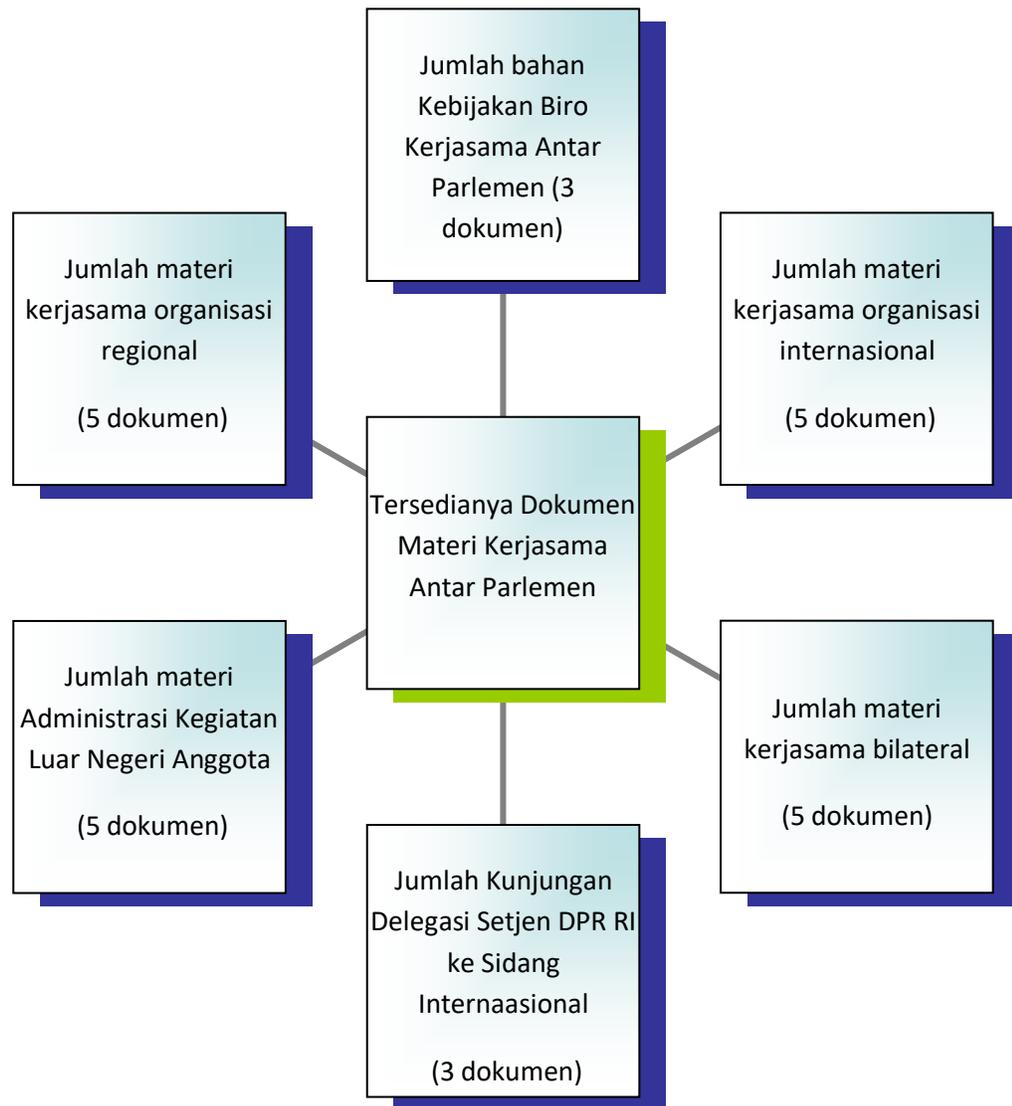
#### **Tersedianya Dokumen Materi Kerjasama Antar Parlemen**

Yang dimaksud dengan dokumen materi Kerjasama Antar Parlemen adalah dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Biro KSAP dalam mendukung Kegiatan Kerjasama Antar parlemen yang dilakukan oleh DPR RI. Sasaran ini memiliki 6 indikator utama, yaitu:

1. Jumlah Bahan Kebijakan Biro Kerjasama Antar Parlemen (KSAP)
2. Jumlah Materi Kerja Sama Organisasi Internasional
3. Jumlah Materi Kerja Sama Organisasi Regional
4. Jumlah Materi Kerja Sama Bilateral
5. Jumlah Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota
6. Jumlah Kunjungan Delegasi Setjen DPR RI ke siding Internasional

Gambar 5

Indikator Kinerja Sasaran “Tersedianya Dokumen Materi Kerjasama Antar Parlemen”



<b>Indikator 1</b>		
<b>Jumlah Bahan Kebijakan Biro Kerjasama Antar Parlemen</b>		
<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>3 dokumen</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>100%</b>

Bahan Kebijakan Biro KSAP pada tahun 2018 ditargetkan 3 dokumen, yang terdiri dari dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, dokumen LAKIP Biro KSAP dan Dokumen Kebijakan Biro KSAP. Pada akhir tahun 2018, 3 dokumen tersebut telah direalisasikan, sehingga capaian target sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 yang sebesar 100 %, maka pada tahun 2018 capaiannya sama yaitu 100% sehingga tidak ada perbedaan pada indikator kinerja pertama Biro Kerjasama Antar Parlemen.

Dalam menyelesaikan ketiga dokumen tersebut, tidak sepenuhnya menggunakan Anggaran yang tersedia. Terjadi efisiensi dalam kegiatan perumusan bahan kebijakan Biro KSAP. Misalnya dalam hal kegiatan paket meeting dalam dan luar kota.

<b>Indikator 2</b>		
<b>Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Internasional</b>		
<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>5 dokumen</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>100%</b>

Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Internasional dari 5 dokumen yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 5 dokumen yang terdiri dari laporan kegiatan per masa persidangan, dengan nilai capaian adalah 100 %.

Yang dimaksud dengan 5 dokumen dalam hal ini yaitu pada tahun 2018 memiliki 5 Masa Sidang, maka output yang ditargetkan setiap masa sidang adalah 1 dokumen, sehingga target dalam 1 tahun adalah 5 dokumen. 1 dokumen tersebut berupa dokumen diplomasi parlemen dalam menghadiri Sidang-Sidang Internasional, antara lain penyiapan itinerary delegasi, agenda delegasi, draft SK Pimpinan, intervensi delegasi, buku *country profile*, buku saku delegasi, press release Sidang, konsep Draft Resolusi, konsep pidato, dan draft Laporan Delegasi.

Setiap dokumen terdiri dari berbagai bahan/materi yang telah disiapkan oleh Sekretariat Kerjasama Internasional dalam mendukung berbagai kegiatan dalam masa sidang tersebut, dimana jumlah 1 dokumen berbeda-beda dalam setiap masa sidang, tergantung banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, baik kegiatan rapat-rapat, penyiapan materi delegasi sidang, laporan dan sebagainya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka capaian pada tahun 2018 tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Besaran capaian antara tahun 2017 dan 2018 juga sama, walaupun dalam hal kuantitas, tahun 2018 ini jumlah kegiatan yang dilakukan lebih sedikit dari tahun sebelumnya dalam hal pengiriman delegasi, karena pada tahun 2017 Bag. KSI mengirimkan sebanyak 31 Delegasi, dan tahun 2018 mengirimkan sebanyak 26 Delegasi menghadiri Konferensi Internasional.

Selain pengiriman delegasi menghadiri konferensi Internasional, Biro Kerjasama Antar Parlemen juga bertanggung jawab dalam mempersiapkan penyelenggaraan dua sidang internasional yang diselenggarakan di Indonesia yaitu *the 2<sup>nd</sup> World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)* dan *the 4<sup>th</sup> MIKTA Speakaers Consultations* serta kegiatan Dewan lainnya seperti mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kunjungan dalam negeri dalam rangka Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (SDGs), peringatan hari Perempuan Internasional (*International Women's Day*), dan Embassy Briefing dan FGD dalam rangka sidang WPFSD.

Belum sejalannya penggunaan anggaran Satker Setjen dengan Satker Dewan dalam kegiatan Kerjasama Organisasi Internasional disebabkan antara lain karena terbatasnya waktu yang tersedia, sehingga rapat-rapat persiapan dan rapat koordinasi dengan mitra terkait dalam rangka persiapan bahan/materi sidang belum dapat terlaksana secara maksimal. Selain itu kegiatan meeting dalam kota pun tidak dapat terlaksana dengan maksimal dikarenakan terbatasnya jumlah SDM yang tersedia, artinya kegiatan meeting dalam kota tersebut tidak dapat dilaksanakan bersamaan waktunya dengan persiapan pengiriman Delegasi BKSAP keluar negeri karena pegawai yang ada sedang mempersiapkan dukungan terhadap Dewan dalam kegiatan tersebut.

<b>Indikator 3</b>		
<b>Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Regional</b>		
<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>5 dokumen</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>100%</b>

Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Regional dari 5 dokumen yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 5 dokumen yang terdiri dari laporan kegiatan per masa persidangan, dengan nilai capaian adalah 100%.

Sama seperti sebelumnya, 5 dokumen yang dimaksud adalah sesuai dengan jumlah masa sidang yang ada dalam satu tahun. Setiap dokumen berbeda-beda jumlah kegiatannya tergantung banyaknya pengiriman delegasi regional dalam setiap masa sidang.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka capaian pada tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu 100% walaupun dalam hal kuantitas, tahun 2018 ini jumlah

kegiatan yang dilakukan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 Biro KSAP menghasilkan output dalam rangka mendukung kegiatan pengiriman Delegasi ke sidang Regional sebanyak 12 kali, sedangkan tahun 2018 jumlah kegiatan adalah 10 kali pengiriman delegasi ke sidang Regional, satu kali persiapan penyelenggaraan sidang *Indonesia – Pacific Parliamentary Partnership on Human Development and Maritime Sustainability* serta kunjungan dalam negeri dalam rangka Panitia Kerja BKSAP Kerjasama Ekonomi Regional ke Semarang – Jawa Tengah.

Selain itu, Biro KSAP juga menyelenggarakan kegiatan *Workshop* dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Tinjauan Implementasi Konvensi PPB Anti Korupsi – UNCAC serta mempersiapkan delegasi mengikuti *Consultative Workshop on the State of Gender-Related Legislation and Participation of Women in the Parliamentary Process of AIPA Member Parliaments* di Jakarta dan persiapan dalam Penganugerahan AIPA *Distinguished Service Award 2018*.

Indikator 4		
Jumlah Materi Kerjasama Bilateral		
Target	Realisasi	Capaian
5 dokumen	5 dokumen	100%

Jumlah Materi Kerjasama Bilateral dari 5 dokumen yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 5 dokumen yang terdiri dari laporan kegiatan per masa persidangan, dengan nilai capaian adalah 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka capaian pada tahun 2018 sama yaitu 100%, walaupun dalam hal jumlah kegiatan yang dilakukan lebih sedikit dari tahun sebelumnya, yaitu dukungan terhadap 7 pengiriman delegasi GKSB (tahun 2018) dibandingkan 15 GKSB (tahun 2017).

Sementara untuk dukungan kegiatan kunjungan teknis BKSAP tahun 2018 adalah lebih banyak yaitu 10 delegasi teknis pada tahun 2018 dibandingkan 3 delegasi pada tahun 2017.

Selain penyiapan bahan-bahan untuk kunjungan delegasi GKSB maupun teknis, Bagian Set. Kerjasama Bilateral juga melakukan kegiatan koordinasi melalui pembuatan surat-surat maupun berita faximile untuk penjajakan kunjungan ke luar negeri oleh Alat Kelengkapan Dewan lainnya seperti Pimpinan DPR, Komisi – Komisi, Badan – Badan maupun Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian.

Bagian Set. Kerjasama Bilateral juga memberikan dukungan atas penerimaan tamu – tamu dari Parlemen Negara sahabat maupun kunjungan Courtesy Call Duta Besar negara sahabat.

Selain itu, Bagian Set. Kerjasama Bilateral juga melakukan persiapan dalam rapat – rapat Pimpinan BKSAP, Rapat Pleno BKSAP, rapat-rapat intern GKSB maupun rapat koordinasi Desk Bilateral.

<b>Indikator 5</b>		
<b>Jumlah Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota Dewan</b>		
<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>5 dokumen</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>100%</b>

Jumlah Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota dari 5 dokumen yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 5 dokumen yang terdiri dari 5 laporan kegiatan per masa persidangan, sehingga capaian adalah 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka capaian pada tahun 2018 adalah sama dengan tahun 2017 yaitu 100%.

Namun demikian, dari sisi kegiatan, bila dibandingkan dengan tahun 2017, kegiatan Minluna mengalami penurunan. Pada tahun 2017 pengiriman delegasi melampaui

target yang ditetapkan, dari 220 anggota yang direncanakan melaksanakan kunjungan, terlaksana 227 kunjungan. Sementara untuk tahun 2018, dari 250 anggota yang direncanakan melakukan kunjungan, terlaksana 117 kunjungan.

Selain melakukan dukungan untuk kegiatan pengiriman delegasi kunjungan individu, Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota juga melakukan dukungan kegiatan penerjemahan. Kegiatan penerjemahan ini dilakukan berdasarkan permintaan, baik penerjemahan lisan maupun penerjemahan tertulis. Permintaan penerjemahan datang dari seluruh Alat Kelengkapan Dewan dan juga dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

<b>Indikator 6</b>		
<b>Jumlah Kunjungan Delegasi Setjen DPR RI ke sidang Internasional</b>		
<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>3 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>66,6%</b>

Indikator 6 merupakan indikator baru di tahun 2018. Pada Tahun 2017, indikator ini belum ada di Biro KSAP. Indikator ini merupakan jumlah kunjungan Delegasi Setjen DPR RI ke sidang Internasional. Pada tahun 2018, direncanakan akan ada 3 jumlah kunjungan, namun sampai dengan akhir tahun terlaksana 2 kali kunjungan delegasi Setjen DPR RI ke sidang Internasional.

## 2. SATKER DEWAN

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Biro KSAP mendapat amanat dari Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan Kerjasama Antar Parlemen yang dilakukan oleh DPR RI khususnya Badan Kerjasama Antar Antar Parlemen. Untuk itu Biro Kerjasama Antar Parlemen menyampaikan laporan kegiatan yang dilakukan pada Satuan Kerja Dewan sebagai bagian dari pertanggungjawaban Biro KSAP dalam mendukung terealisasinya Kegiatan DPR RI dalam kaitannya dengan Diplomasi Parlemen.

Berikut ini adalah adalah penjelasan capaian dari sasaran pada tahun 2018.

### SASARAN 1

#### Layanan Sidang/Konferensi di dalam negeri

#### Indikator

#### Jumlah Penyelenggaraan Konferensi/Seminar Regional/Internasional

Target	Realisasi	Capaian
3 Konferensi	3 Konferensi	100%

Pada tahun 2018, 3 Sidang yang direncanakan terselenggara pada tahun tersebut dapat terealisasi seluruhnya, yaitu:

1. Penyelenggaraan sidang *Indonesia – Pacific Parliamentary Partnership on Human Development and Maritime Sustainability*, tanggal 23 – 24 Juli 2018 di Grand Hyatt Jakarta
2. Penyelenggaraan sidang *the 2<sup>nd</sup> World Parliamentary Forum on Sustainable Development* yang kedua pada tanggal 12 - 13 September 2018 di Bali. Konferensi

tersebut menghasilkan *Bali Commitment* dengan tema *Partnership towards Sustainable Energies for All*.

3. Penyelenggaraan sidang *The 4<sup>th</sup> MIKTA Speakers Consultation* tanggal 15-17 September 2018 di Ubud – Bali.

Dalam penyelenggaraan Konferensi Regional/Internasional di dalam Negeri, Biro Kerjasama Antar Parlemen memberikan dukungan berupa penyiapan bahan-bahan materi persidangan, baik berupa sambutan-sambutan, point-point pembicaraan, skenario sidang, administrasi untuk penentuan tempat sidang dan seluruh proses penyelenggaraan sidang dan juga dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam sidang tersebut.

Capaian untuk sasaran “Layanan Sidang/Konferensi dalam negeri” pada tahun 2018 adalah sebesar 100% yaitu direncanakan jumlah penyelenggaraan konferensi/seminar regional/internasional sebanyak 3 konferensi dan terealisasi sebanyak 3 konferensi.

Dibandingkan dengan tahun 2017 yang juga direncanakan 3 konferensi dan terealisasi 3 konferensi dengan capaian 100%, maka pada tahun 2018 memiliki capaian yang sama yaitu 100%

Selain dukungan terhadap penyelenggaraan konferensi/seminar regional/internasional yang menjadi indikator tersebut, Biro KSAP juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seminar/workshop di dalam negeri lainnya sebagai berikut:

- Peringatan *International Women’s Day* pada tanggal 14 Maret 2018 di Lobby Gedung Nusantara DPR RI, yang memfokuskan pembahasan pada peran wanita di dalam dunia kerja dan diskusi untuk mendalami berbagai cara untuk mencapai kesetaraan gender di dalam lingkungan kerja yang saat ini berubah seiring dengan dinamika yang dibawa oleh pekerja perempuan dan perubahan globalisasi, revolusi teknologi, kebijakan perdagangan baru dan juga dampak dari perubahan iklim. Hal ini tentu membutuhkan kebijakan baru yang inovatif yang meningkatkan status pekerjaan informal, akses perempuan terhadap akses teknologi dan juga pekerjaan layak yang dapat melindungi perempuan dari perubahan iklim dan kekerasan di tempat kerja.

- *Embassy Briefings on World Parliamentary Forum on Sustainable Development* pada tanggal 25 Juli 2018 di Gedung Pustakaloka DPRRI dalam rangka sosialisasi penyelenggaraan konferensi the 2<sup>nd</sup> *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* kedua yang diselenggarakan pada tanggal 12 – 13 September 2018 di Bali.

Pertemuan ini ditujukan untuk memberikan informasi yang lengkap tentang konferensi tersebut dan diharapkan dapat meningkatkan animo negara-negara yang diundang untuk mengirimkan banyak delegasi dalam konferensi dimaksud.

- *Focus Group Discussion (FGD)* dalam rangka Persiapan Penyelenggaraan *The 2<sup>nd</sup> World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)* dengan Bappenas, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian ESDM pada tanggal 18 Mei 2018 di Gedung Nusantara III Lantai 2 DPR RI sebagai persiapan untuk mendapatkan masukan untuk sidang tersebut.
- Kunjungan Kerja BKSAP dalam rangka “BKSAP Day” yaitu kegiatan BKSAP untuk mensosialisasikan dan melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat luas khususnya kaum muda tentang BKSAP dan kinerja BKSAP yang telah tercapai maupun rencana kedepan. Program BKSAP Day ditujukan untuk mendorong mahasiswa/kaum muda lebih sadar politik, tidak ragu menggeluti dunia politik dan bersedia terjun ke dunia politik tanpa ragu, misalnya berani menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum.
  - BKSAP Day ke Universitas Diponegoro, Semarang, pada tanggal 6-8 Maret 2018
  - BKSAP Day ke SMA Negeri Malang pada tanggal 15 – 17 November 2018
- Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) BKSAP
  - Panja BKSAP untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Aceh pada tanggal 5-7 Maret 2018
  - Kunjungan Panitia Kerja BKSAP DPR RI untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke Provinsi Sulawesi Utara tanggal 4 – 6 April 2018
  - Biro KSAP juga menyusun bahan “Rekomendasi Panja” BKSAP.

## SASARAN 2

### Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri

#### Indikator

Jumlah Keikutsertaan DPR di Sidang Organisasi Regional/Internasional	Target	Realisasi	Capaian
	58 kali	57 kali	98,2%

Untuk Sasaran 2 “Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri” dengan Indikator “Jumlah Keikutsertaan DPR di Organisasi Regional/Internasional” semula ditargetkan 63 kali, namun mengalami perubahan target menjadi 58 kali. Sampai Desember 2018 telah terlaksana 57 kali, dengan demikian capaiannya adalah sebesar 98,2%. Tidak tercapainya 100% pada Indikator Jumlah keikutsertaan DPR di Sidang Organisasi Regional/Internasional disebabkan oleh waktu sidang yang bersamaan dengan kegiatan Anggota Dewan lainnya sehingga DPR RI tidak dapat mengirimkan delegasi ke Sidang tersebut.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, Biro Kerjasama Antar Parlemen dengan target 48 kali namun terealisasi sebanyak 60 kali kunjungan atau 125%, sementara di tahun 2018 tercapai 98,2%, maka terjadi penurunan capaian sebesar 26,8%. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2018 kegiatan Dewan lebih banyak dilakukan untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang maupun kegiatan di Daerah Pemilihan, sehingga untuk menghadiri kegiatan di konferensi internasional/regional tidak seperti tahun sebelumnya.

Didalam mendukung kegiatan Dewan dalam menghadiri Sidang-Sidang Internasional, Biro Kerjasama Antar Parlemen memberikan dukungan teknis, administrative dan substansi kepada Dewan dan menghasilkan *output* berupa

itinerary Delegasi, Agenda Delegasi, Draft Resolusi, Draft SK Pimpinan, intervensi delegasi, Buku Posisi Delegasi, Leaflet delegasi, Administrasi Perjalanan, Buku saku delegasi, rilis hasil sidang ke medsos/medcet, dan draft laporan delegasi.

Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri dalam kegiatan Internasional di Biro KSAP meliputi 3 kegiatan utama, yaitu layanan pengembangan hubungan kerjasama luar negeri dalam menghadiri sidang-sidang internasional, layanan pengembangan hubungan kerjasama luar negeri dalam menghadiri sidang-sidang regional, dan layanan pengembangan hubungan kerjasama luar negeri dalam kegiatan bilateral.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing kegiatan tersebut:

#### **1. Layanan Pengembangan hubungan Kerjasama Luar Negeri dalam kegiatan menghadiri sidang-sidang internasional :**

Dalam rangka mengembangkan hubungan kerjasama Luar Negeri, BKSAP DPR RI menghadiri Sidang-Sidang Internasional seperti Sidang *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, Sidang *Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC)*, Sidang *United Nations on High Level Political Forum (UN HLPF)*, *Organization on Economic Cooperation on Development (OECD)*, *World Trade Organizations (WTO)*, *United Nation on Climate Change Conference (UNFCCC)*, dan sebagainya. Berikut ini adalah table data output dukungan Biro KSAP dalam mendukung BKSAP dalam menghadiri Sidang-Sidang Internasional pada tahun 2018.

**Tabel 4**  
**Data Output Dukungan dalam Sidang-sidang Internasional Tahun 2018**

<b>OUTPUT</b>	<b>MASA SIDANG III</b>	<b>MASA SIDANG IV</b>	<b>MASA SIDANG V</b>	<b>MASA SIDANG I</b>	<b>MASA SIDANG II</b>
<b>Itinerary Delegasi</b>	4 item	4 item	5 item	6 item	7 item
<b>Agenda Delegasi</b>	4 item	4 item	5 item	6 item	7 item
<b>Draft Intervensi Delegasi</b>	4 berkas	4 berkas	5 berkas	6 berkas	7 berkas
<b>Draft SK Pimpinan</b>	4 draft	4 draft	5 draft	6 draft	7 draft
<b>Draft resolusi</b>	4 draft	4 draft	5 draft	6 draft	7 draft
<b>Buku Posisi Delegasi</b>	4 buku	4 buku	5 buku	6 buku	7 buku
<b>Leaflet Delegasi</b>	200 lbr	200 lbr	250 lbr	300 lbr	350 lbr
<b>Buku Saku Delegasi</b>	4 buku	4 buku	5 buku	6 buku	7 buku
<b>Draft Press release Sidang</b>	4 item	4 item	5 item	6 item	7 item
<b>Draft Laporan Delegasi</b>	4 buku	4 buku	5 buku	6 buku	7 buku
<b>Administrasi perjalanan</b>	4 berkas	4 berkas	5 berkas	6 berkas	7 berkas
<b>Jumlah</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>

Jika dibandingkan tahun 2017 yang terjadi 29 kegiatan pengiriman delegasi, di tahun 2018 melakukan persiapan 26 pengiriman delegasi, maka mengalami penurunan sebanyak 3 delegasi. Dalam hal ini juga terdapat kendala dalam hal sumber daya manusia yang tersedia di Biro KSAP yang terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga perlu ada upaya perbaikan yang dilakukan oleh

Setjen DPR RI dalam hal ini unit kerja yang terkait dengan SDM guna mengatasi kendala tersebut. Karena kedepannya Biro KSAP ingin semakin meningkatkan kualitas dukungannya kepada Dewan dan memutakhirkan basis data dan penggunaan teknologi didalam memberikan dukungan teknis, administrative maupun substansi kepada Anggota Dewan guna mencapai diplomasi parlemen yang lebih optimal.

**2. Layanan Pengembangan hubungan Kerjasama Luar Negeri dalam kegiatan menghadiri sidang-sidang regional :**

Selain dukungan dalam kegiatan pengiriman delegasi ke Sidang-sidang Internasional, Biro KSAP juga memberi dukungan dalam kegiatan pengiriman delegasi ke Sidang-sidang regional.

Kegiatan Kerjasama regional Biro Kerjasama Antar Parlemen juga telah mencapai output 5 dokumen selama tahun 2018 dalam mendukung 10 kegiatan pengiriman Delegasi pada Sidang-sidang regional dengan rincian capaian output sebagai berikut:

**Tabel 5**

**Data Output Dukungan Kegiatan Biro KSAP dalam Sidang-sidang Regional Tahun 2018**

<b>OUTPUT</b>	<b>MASA SIDANG III</b>	<b>MASA SIDANG IV</b>	<b>MASA SIDANG V</b>	<b>MASA SIDANG I</b>	<b>MASA SIDANG II</b>
<b>Itinerary Delegasi</b>	1 item	1 item	2 item	5 item	1 item
<b>Agenda Delegasi</b>	1 item	1 item	2 item	5 item	1 item
<b>Draft Intervensi Delegasi</b>	1 berkas	1 berkas	2 berkas	5 berkas	1 berkas
<b>Draft Pimpinan</b>	<b>SK</b> 1 draft	1 draft	2 draft	5 draft	1 draft

<b>Draft resolusi</b>	1 draft	1 draft	2 draft	5 draft	1 draft
<b>Buku Posisi Delegasi</b>	1 buku	1 buku	2 buku	5 buku	1 buku
<b>Leaflet Delegasi</b>	50 lbr	50 lbr	100 lbr	250 lbr	50 lbr
<b>Buku Saku Delegasi</b>	1 buku	1 buku	2 buku	5 buku	1 buku
<b>Press release Sidang</b>	1 item	1 item	2 item	5 item	1 item
<b>Draft Laporan Delegasi</b>	1 buku	1 buku	2 buku	5 buku	1 buku
<b>Administrasi perjalanan</b>	1 berkas	1 berkas	2 berkas	5 berkas	1 berkas
<b>Jumlah</b>	1 dokumen				

Jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang memiliki kegiatan pengiriman Delegasi kesidang Regional sebanyak 14 kegiatan, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 10Kegiatan.

Di lingkup kerjasama regional dan internasional, Biro KSAP juga menjaga kontinuitas keanggotaan Indonesia di beberapa organisasi internasional yang Indonesia secara rutin membayar kontribusi tahunan seperti IPU, AIPA, PUIC, ASGP dan keanggotaan Indonesia organisasi lainnya baik organisasi parlemen maupun non parlemen seperti APA, APPF, OECD, WIP dan ERIA. Disamping itu, Indonesia pada tahun 2018 masih menjadi anggota tetap diantaranya Ketua Global Parliamentarians against Corruption (GOPAC), Ketua Komisi International Humanitarian Laws IPU, Anggota tetap di Komisi UN Affairs IPU, *Board Member di Komite Young Parliamentarians IPU*, dan anggota tetap di komisi Middle East Questions IPU. Selain itu Biro KSAP

juga menjadi sekretariat GOPAC dunia dan juga national chapter dari GOPAC Indonesia.

### **3. Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri dalam kegiatan bilateral**

Biro Kerjasama Antar Parlemen memberikan dukungan teknis, administrasi dan substansi kepada Dewan dalam melakukan Kunjungan Teknis BKSAP ke 11 negara dan Kunjungan GKSBB ke 8 negara pada tahun 2018, termasuk 1 GKSBB yang telah dipersiapkan kunjungannya dan batal pada saat-saat terakhir karena permasalahan teknis yaitu visa yang tidak kunjung dikeluarkan kedutaan Arab Saudi.

Bila dibandingkan dengan tahun 2017, dimana Biro KSAP memberikan dukungan atas kunjungan GKSBB ke 14 negara, dan 3 negara kunjungan teknis maka ada penurunan jumlah pengiriman delegasi GKSBB sebanyak 7 negara dan penambahan jumlah pengiriman delegasi Teknis BKSAP sebanyak 8 negara untuk tahun 2018.

Dari kunjungan teknis dan GKSBB tersebut telah dicapai berbagai kesamaan pendapat terkait dengan peningkatan hubungan diantara DPR RI dengan parlemen negara sahabat, baik dalam hal saling dukung dalam keanggotaan organisasi internasional, saling kunjung diantara parlemen, serta beberapa penandatanganan MoU antar parlemen. Dari berbagai kunjungan tersebut, juga dibahas dan disepakati untuk peningkatan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya dan sama-sama memberikan dukungan kepada pemerintah masing-masing untuk terus mendukung upaya kerjasama yang baik diantara kedua negara serta melakukan langkah-langkah konkret untuk mendukung peningkatan investasi di Indonesia maupun di negara-negara sahabat.

Tabel 6

## Data Output Dukungan Kegiatan Biro KSAP dalam Kerjasama Bilateral Tahun 2018

OUTPUT	MASA SIDANG III	MASA SIDANG IV	MASA SIDANG V	MASA SIDANG I	MASA SIDANG II
<b>TOR Kunjungan</b>	1 draft	5 draft	1 draft	6 draft	5 draft
<b>Dok. Penjajakan</b>	1 berkas	5 berkas	1 berkas	6 berkas	5 berkas
<b>Itinerary Delegasi</b>	1 item	5 item	1 item	6 item	5 item
<b>Agenda Delegasi</b>	1 item	5 item	1 item	6 item	5 item
<b>Leaflet Delegasi</b>	30 lembar	150 lembar	30 lembar	180 lembar	150 lembar
<b>Draft SK Pimpinan</b>	1 draft	5 draft	1 draft	6 draft	5 draft
<b>Buku Saku Delegasi</b>	1 buku	5 buku	1 buku	6 buku	5 buku
<b>Press release Kegiatan</b>	1 item	5 item	1 item	6 item	5 item
<b>Draft Laporan Delegasi</b>	1 buku	5 buku	1 buku	6 buku	5 buku
<b>Administrasi perjalanan</b>	1 berkas	5 berkas	1 berkas	6 berkas	5 berkas
<b>Jumlah</b>	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Selain dukungan layanan pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri dalam Kegiatan Bilateral, Biro KSAP juga mendukung terlaksananya Rapat-Rapat BKSAP Serta Penerimaan Tamu (*Friendly Talk*) Delegasi Parlemen Negara Sahabat Dan *Courtesy Call* Dengan Duta Besar Negara Sahabat. Berikut ini table data dukung dalam kegiatan Rapat-rapat, *Courtesy Call* dan *Friendly Talk* BKSAP tahun 2018

Tabel 7

Data Output Dukungan Kegiatan Biro KSAP dalam Kegiatan Rapat-rapat, *Courtesy call* dan *Friendly talk* BKSAP DPR RI Tahun 2018

OUTPUT	MASA SIDANG III	MASA SIDANG IV	MASA SIDANG V	MASA SIDANG I	MASA SIDANG II
Draft Pointers	11 draft	18 draft	8 draft	8 draft	5 draft
Draft Laporan Singkat	11 draft	18 draft	8 draft	8 draft	5 draft
Jumlah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

### SASARAN 3

Layanan Pelaksanaan Peran Diplomasi Anggota DPR RI

### Indikator

Jumlah Anggota DPR RI yang melaksanakan peran diplomasi parlemen

Target	Realisasi	Capaian
250 Anggota	117 Anggota	46,8%

Dalam pelaksanaan peran diplomasi Anggota DPR RI, terdapat dukungan administrasi Kunjungan Individu Anggota dan Pelaksanaan kegiatan alih bahasa/penerjemahan. Selama tahun 2018, pelaksanaan peran diplomasi Anggota DPR RI sebanyak 117 Anggota Dewan ke negara sahabat (dengan rincian terlampir). Adapun capaian dukungan layanan untuk kedua kegiatan tersebut sebagai berikut:

a. Dukungan Administrasi Kunjungan Individu Anggota

**Tabel 8**

**Data Output Dukungan Kegiatan Biro KSAP dalam Diplomasi Individu DPR RI  
Tahun 2018**

<b>OUTPUT</b>		<b>MASA SIDANG III</b>	<b>MASA SIDANG IV</b>	<b>MASA SIDANG V</b>	<b>MASA SIDANG I</b>	<b>MASA SIDANG II</b>
<b>Itinerary Delegasi</b>		2 item	9 item	6 item	6 item	6 item
<b>Agenda Delegasi</b>		2 item	9 item	6 item	6 item	6 item
<b>Draft Pimpinan</b>	<b>SK</b>	2 draft	9 draft	6 draft	6 draft	6 draft
<b>Dokumen Penjajakan</b>		2 draft	9 draft	6 draft	6 draft	6 draft
<b>Administrasi perjalanan</b>		2 berkas	9 berkas	6 berkas	6 berkas	6 berkas
<b>Jumlah</b>		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memiliki capaian 102,3% dengan target 220 dan terealisasi 227, maka tahun ini mengalami penurunan capaian sebesar 55,5%

Tidak tercapainya realisasi pelaksanaan diplomasi Individu DPR RI disebabkan karena permintaan kunjungan individu dari Anggota DPR yang tidak memberi cukup waktu untuk penjajakan sehingga penerimaan parlemen negara sahabat belum dapat menerima sesuai tanggal yang diinginkan. Selain itu padatnya kegiatan Anggota DPR RI baik di Komisi maupun di daerah pemilihannya membuat pada tahun ini belum semua Anggota mengajukan kepada Biro KSAP untuk memproses Kunjungan individu mereka.

**b. Pelaksanaan Kegiatan Alih Bahasa/Penerjemahan**

Biro KSAP juga melakukan dukungan kegiatan dalam penerjemahan tertulis dan lisan untuk Pimpinan DPR, BKSAP dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya dengan output kegiatan selama tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 9**

**Data Output Kegiatan Alih Bahasa/penerjemahan lisan dan tertulis Tahun 2018**

<b>OUTPUT</b>	<b>MASA SIDANG III</b>	<b>MASA SIDANG IV</b>	<b>MASA SIDANG V</b>	<b>MASA SIDANG I</b>	<b>MASA SIDANG II</b>
<b>I. Terjemahaan Lisan, terdiri dari :</b>					
Bahasa Inggris	18 Kegiatan	23 Kegiatan	19 Kegiatan	20 Kegiatan	22 Kegiatan
Bahasa Arab	-	3 Kegiatan	1 Kegiatan	-	4 Kegiatan
Bahasa Isyarat	-	-	-	1 Kegiatan	-
<b>II. Terjemahan Tertulis Berbahasa Inggris dan V.V., terdiri dari</b>					
Kerangka Acuan	10 item	13 item	20 item	10 item	12 item
Pidato	10 item	3 item	-	10 item	3 item
Surat	61 item	58 item	43 item	69 item	70 item
Bio Data	10 item	13 item	20 item	-	30 item
Makalah Seminar	5 item	-	5 item	-	-
Website	6 item	6 item	6 item	6 item	6 item
Resolusi	-	-	10 item	10 item	10 item
MoU	-	1 item	-	-	-
Dokumen Berbahasa Thailand	-	-	-	1 item	-
Dokumen berbahasa Arab	-	-	-	-	5 item
<b>Jumlah</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>1 dokumen</b>

**Keterangan :**

- Terjemahan tertulis Bahasa Inggris

Dokumen bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya seperti : buku, pidato, Laporan, surat-surat dari negara lain, surat Indonesia-Inggris, MoU, *Agreed Minutes of Meeting, Joint Statement, Term of References*, terjemahan produk hukum, terjemahan ilmiah, terjemahan presentasi dan CV Indonesia-Inggris

- Dari masing-masing dokumen dan surat bervariasi jumlah halamannya, mulai dari 1 lembar sampai puluhan halaman, bahkan ratusan halaman. Untuk yang sudah ratusan halaman dilakukan *outsourcing*, Penerjemah Muda melakukan *editing* dari penerjemah *outsourced*

### C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung fungsi Dewan, Biro KSAP ditunjang dengan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018. Dalam DIPA tersebut, Biro KSAP mengelola 2 Satuan Kerja (Satker) Anggaran, yaitu Satker Setjen dan Satker Dewan. Dengan DIPA tersebut Biro KSAP melaksanakan tugas dan fungsi Biro KSAP melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja.

#### 1. KINERJA ANGGARAN SATKER DEWAN

Pada tahun 2017, BKSAP telah mengajukan Usulan Anggaran untuk Tahun 2018 sebesar Rp. 199.913.049.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), dalam **DIPA Tahun 2018** disetujui sebesar **Rp. 193.543.821.000,-** (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*), akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan pembentukan AKD Baru (Wakil Ketua DPR RI dan BAKN), anggaran BKSAP mengalami revisi/pengurangan sehingga menjadi sebesar **Rp. 185.087.733.000,-** (*Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) atau mengalami penurunan  $\pm 7,42\%$ .

Berikut persandingan usulan Anggaran BKSAP dengan DIPA Tahun 2018 dalam Program Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri:

**Tabel 10**  
**Data Persandingan Usulan Anggaran BKSAP dengan DIPA BKSAP Tahun 2018**

No	Kegiatan	Usulan BKSAP		DIPA Tahun 2018		Persentase Naik/Turun
		Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	
1	Layanan Sidang/ Konferensi di Dalam Negeri	18.933.309.000	3 kali	<b>28.408.174.000</b>	3 kali	↑ 50,04 %
2	Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	106.432.048.000	66 kali	<b>81.474.503.000</b>	58 kali	↓ 23,45 %
3	Layanan Pelaksanaan Peran Diplomasi Anggota DPR RI	74.547.692.000	250 kali	<b>75.205.056.000</b>	250 kali	↑ 0,88 %
	<b>Jumlah</b>	<b>199.913.049.000</b>		<b>185.087.733.000</b>		↓ 7,42 %

Dengan berubahnya pagu Anggaran tersebut, maka Penetapan Kinerja di Biro KSAP juga mengalami perubahan dalam salah satu target yaitu dalam Sasaran Program/Kegiatan : Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri dengan indikator Kinerja : Jumlah keikutsertaan DPR di Organisasi Regional/ Internasional dalam rangka diplomasi parlemen, semula 66 kali menjadi 58 kali.

Adapun realisasi anggaran tahun 2018 untuk Satker Dewan sebesar Rp.125.563.005.487,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) setara dengan 67,84% dengan rincian sebagaimana dalam table 11, berikut ini :

**Tabel 11**  
**Realisasi Anggaran tahun 2018 untuk Satker Dewan**

No	Kegiatan	DIPA Tahun 2018		Realisasi s.d. TW IV		Sisa Anggaran
		Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	
1	Layanan Sidang/ Konferensi di Dalam Negeri	28.408.174.000	3 kali	<b>19.798.349.760</b>	3 kali	8.609.824.240
2	Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	81.474.503.000	58 kali	<b>65.590.267.377</b>	57 kali	15.884.235.623
3	Layanan Pelaksanaan Peran Diplomasi Anggota DPR RI	75.205.056.000	250 kali	<b>40.174.388.350</b>	117 kali	35.030.667.650
<b>Jumlah</b>		<b>185.087.733.000</b>		<b>125.563.005.487</b>		<b>59.524.727.513</b>

Anggaran Satker Dewan digunakan untuk penyelenggaraan konferensi dalam negeri, pengembangan hubungan kerjasama luar negeri dan pelaksanaan peran diplomasi Anggota DPR RI.

Pengiriman Delegasi BKSAP ke Luar Negeri terdiri dari:

1. Pengiriman Delegasi DPR RI ke Konferensi/Sidang-sidang yang terkait dengan kerja sama organisasi Parlemen internasional yang meliputi IPU, PUIC, GOPAC, OECD, WTO, badan-badan dibawah PBB dan organisasi internasional lainnya;
2. Pengiriman Delegasi DPR RI ke Konferensi/Sidang-sidang yang terkait dengan kerja sama organisasi Parlemen regional yang meliputi AIPA, APA, APPF, dan organisasi regional lainnya; dan
3. Pengiriman Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Negara Sahabat ke Negara-negara sahabat.
4. Pengiriman Delegasi kunjungan Individu ke berbagai negara sebagai bentuk diplomasi parlemen secara perorangan.

## **Panitia Kerja (Panja) BKSAP**

Biro KSAP telah memberikan dukungan bagi BKSAP DPR RI untuk pembentukan Panitia Kerja (Panja di Tahun 2018 dengan), yaitu:

1. Panitia Kerja (Panja) BKSAP tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); dan
2. Panitia Kerja (Panja) BKSAP tentang Kegiatan Agenda Pembangunan Berkelanjutan.

### **Realisasi anggaran sepanjang tahun 2018 tidak tercapai maksimal karena:**

- Beberapa GKSBB tidak terlaksana kunjungannya disebabkan parlemen terkait tidak bisa menerima kunjungan sesuai jadwal yang diajukan dan banyak anggota GKSBB yang tidak bisa ikut kunjungan karena bentrok jadwal kunjungan dengan acara kunjungan AKD lainnya maupun acara Partai yang tidak bisa ditinggalkan
- Realisasi anggaran untuk kunjungan kerja individu pada saat-saat terakhir, banyak anggota yang membatalkan rencana kunjungan disebabkan berbagai kesibukan di AKD maupun di Partai. Setidaknya ada 12 delegasi yang batal berangkat dengan perkiraan anggaran sekitar Rp. 10 Milyar yang tidak jadi terlaksana.

## **2. Kinerja Anggaran Satker Setjen**

Selain penggunaan Anggaran dengan Satuan Kerja Dewan sebagaimana tersebut diatas, kinerja Biro Kerjasama Antar Parlemen juga didukung oleh Anggaran dengan Satuan Kerja Sekretariat yang berjumlah **Rp 3.664.629.000,-** (*Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*)

Dari jumlah tersebut, sampai dengan bulan Desember 2018 atau sampai dengan Triwulan IV, telah terealisasi sebesar **Rp 3.063.824.202,-** (*Tiga Milyar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Rupiah*) atau **83,61 %** (*Delapan Puluh Tiga koma Enam Puluh Satu Persen*).

Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berikut :

- 1) Perumusan Bahan Kebijakan Biro KSAP;
- 2) Fasilitasi Kerja Sama Organisasi Internasional, Regional, Bilateral dan Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota;
- 3) Pelaksanaan Pengiriman Penerjemah dalam rangka pengembangan SDM, dan kegiatan-kegiatan pendidikan serta seminar di daerah dan luar negeri.
- 4) Pelaksanaan Pengiriman Delegasi Setjen dan BK DPR RI ke Sidang ASGP di Jenewa, Swiss sebanyak 2 kali pengiriman

# BAB IV

## PENUTUP

**Keberhasilan**

**Hambatan dan Masalah**

**Pemecahan Masalah**

Secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Biro KSAP tahun 2018 telah dilaksanakan dengan optimal, semua kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif pada visi dan misi Biro KSAP. Namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan kepada Anggota Dewan untuk lebih baik lagi. Mengenai keberhasilan, hambatan dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut:

**A. KEBERHASILAN**

Keberhasilan yang dicapai antara lain:

1. Meningkatnya kualitas bahan-bahan terkait dengan substansi mengenai isu-isu bilateral, regional dan internasional;
2. Meningkatnya kuantitas dukungan kegiatan kerjasama antar parlemen;
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan alih bahasa/penerjemahan;
4. Meningkatnya kuantitas dukungan kepada DPR RI dalam pelaksanaan kunjungan individu Anggota DPR RI dalam rangka diplomasi parlemen

**B. HAMBATAN DAN MASALAH**

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, Biro KSAP telah berupaya maksimal dalam memberikan dukungan teknis, administratif dan substansi kepada DPR RI. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena dinamika agenda DPR yang mengakibatkan serapan anggaran tidak maksimal dan selain itu tidak dipungkiri masih ada catatan dari Anggota Dewan

dalam hal kualitas materi yang disiapkan, dan kecepatan serta ketepatan penyiapan hal-hal teknis lainnya.

Hal ini disebabkan oleh:

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pegawai  
Saat ini jumlah SDM di Biro KSAP belum sesuai dengan beban kerja. Kemudian, terkait erat dengan tugas dan fungsi Biro KSAP yang utamanya melakukan analisis terhadap beragam isu-isu bilateral/regional/internasional; memberikan dukungan untuk persidangan di dalam maupun di luar negeri; serta dukungan penerjemahan baik lisan maupun tertulis, masih kurang staf yang memiliki penguasaan analisis yang baik serta bahasa Inggris yang sempurna dan pengetahuan bahasa asing lainnya dengan baik, disamping kompetensi dan penguasaan ilmu-ilmu lain yang baik pula. Hal itu antara lain disebabkan karena sebagian staf yang ditugaskan di Biro KSAP tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan di Biro KSAP.
2. Kurangnya kordinasi, baik antar unit di BKSAP sendiri, dengan unit kerja di luar BKSAP maupun dengan instansi luar. Hal ini terjadi antara lain karena volume kegiatan yang cukup banyak yang menyita sebagian besar waktu yang ada, sehingga tidak tersedia cukup waktu yang memadai untuk kegiatan koordinasi.
3. Dukungan teknologi dan sarana/prasarana yang kurang memadai. Semua pegawai di Biro KSAP telah disediakan sarana komputer, namun tidak semuanya dapat berfungsi dengan baik. Beberapa komputer yang tersedia masih belum maksimal untuk mengejar kecepatan dalam bekerja. Akses internet sudah disediakan, namun kadangkala masih terjadi putus sambung. Ruang kerja yang tersedia sangat terbatas sehingga mempengaruhi semangat kerja pegawai, karena berkas-berkas banyak bertumpuk tanpa ada ruangan yang cukup memadai untuk menampungnya.

4. Distorsi atas perencanaan / pelaksanaan

Kebijakan yang berubah sewaktu-waktu, mengakibatkan kendala dalam layanan di bidang substansi maupun teknis, terutama dalam hal pengiriman delegasi ke luar negeri maupun penerimaan tamu-tamu delegasi dari parlemen luar negeri, misalnya pembatalan kunjungan ke luar negeri maupun pembatalan kunjungan tamu yang akan datang yang pemberituannya begitu singkat menjelang pelaksanaan kegiatan. Perubahan atas perencanaan kegiatan mengakibatkan penyerapan anggaran yang tidak sesuai rencana.

**C. PEMECAHAN MASALAH**

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi perlu dilakukan dengan cara:

1. Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI perlu menempatkan staf yang tepat sesuai antara latar belakang pendidikan maupun ketrampilan dengan tugas pokok dan fungsi BKSAP.

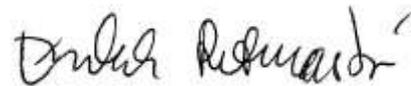
*Catatan: Hal ini sudah disampaikan pada rekomendasi tahun 2017 namun belum terlaksana.*

2. Peningkatan kuantitas SDM yang memiliki penguasaan substansi tentang isu – isu hubungan internasional baik bilateral, regional maupun internasional, serta disiplin ilmu lainnya melalui diklat/sekolah.
3. Penyelesaian penyusunan *Standard Operation Procedure* (SOP) untuk kegiatan yang belum ada SOP, dan penyusunan panduan teknis untuk kegiatan lain yang diperlukan.
4. Mengintensifkan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dan beragam pemangku kepentingan.
5. Untuk peningkatan penyerapan anggaran, perlu dioptimalkan dalam penyusunan *cash planning* serta kegiatan monitoring pada setiap bulannya serta melakukan revisi anggaran jika dibutuhkan dalam upaya meningkatkan optimalisasi

penggunaan anggaran. Selain itu juga dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Pimpinan dalam hal memberi informasi terkait kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana guna mendapatkan arahan lebih lanjut.

6. Pengembangan teknologi informasi (TI) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPR-RI dan masyarakat, yaitu dengan updating database referensi BSAKP, pemuatan informasi terbaru tentang BKSAP melalui web site DPR RI baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia;
7. Peningkatan sarana/prasarana yang memadai dan *updated* untuk menunjang seluruh kegiatan BKSAP.

Jakarta, 25 Januari 2019  
Kepala Biro KSAP,



**Endah TD Retnoastuti**  
NIP.116804021993022001

# LAMPIRAN

**Data Kegiatan Sidang - Sidang  
Internasional Tahun 2018**

**Data Sidang ASGP SETJEN DPR-RI**

**Data Kegiatan Sidang - Sidang Regional  
Tahun 2018**

**Data Kegiatan Sidang - Sidang  
Internasional & Lain-lain di Dalam Negeri  
Tahun 2018**

**Kunjungan Teknis BKSAP**

**Kunjungan GKSB**

**Data Kegiatan Alih Bahasa Lisan dan  
Tertulis Tahun 2018**

**Matriks Kunjungan Individu ke Luar  
Negeri**

## Data Kegiatan Sidang-sidang Internasional Tahun 2018

Masa Persidangan III Sidang : 9 Januari - 14 Februari 2018 Reses : 15 Februari - 4 Maret 2018		
1.	Delegasi DPR RI ke <i>The 13<sup>th</sup> Session of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) and other related meetings</i> ' tanggal 11 – 19 Januari 2018, Teheran, Iran	1
2.	Delegasi DPR RI ke <i>The 7<sup>th</sup> Economy and Social Council (ECOSOC) Youth Forum</i> pada tanggal 29 Januari – 2 Februari 2018 di New York, Amerika Serikat	2
3.	Delegasi DPR RI ke <i>The 7<sup>th</sup> of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Parliamentary Day</i> tanggal 5 – 10 Februari 2018 di Paris, Perancis	3
4.	Delegasi DPR RI ke <i>The 2018 Parliamentary Hearing at the United Nations (UN Hearing)</i> tanggal 20 - 26 Februari 2018 di New York, Amerika Serikat	4
Masa Persidangan IV Sidang 5 Maret – 27 April 2018 Reses 28 April – 17 Mei 2018		
5.	Delegasi DPR RI ke <i>Westminster Conference on Violence against Women in Politics</i> tanggal 17- 23 Maret 2018 di London – Inggris	1
6.	Delegasi DPR RI ke <i>The 138 Assembly of IPU and Related Meetings</i> tanggal 22-29 Maret 2018 di Jenewa – Swiss	2
7.	Delegasi DPR RI ke <i>Global Parliamentary Conference of Parliamentary Network (GPC) on the World Bank and International Monetary Fund (IMF)</i> tanggal 16-17 April 2018 di Washinton DC, Amerika Serikat	3
8.	Delegasi DPR RI ke <i>The 41<sup>th</sup> Session of the Steering Committee (SC) of the Parliamentary Conference on the World Trade Organization (PCWTO)</i> tanggal 24 – 25 April 2018 di Brussels, Belgia	4
Masa Persidangan V Sidang 18 Mei – 28 Juli 2018 Reses 29 Juli – 15 Agustus 2018		
9.	Delegasi BKSAP DPR RI untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam rangka Kunjungan Teknis tanggal 22-28 Mei 2018 ke Wellington, Selandia Baru	1
10.	Delegasi DPR RI ke <i>The Women Political Leaders Global Forum (WPL) Summit 2018</i> tanggal 6-8 Juni 2018 di Vilnius-Lithuania	2
11.	Delegasi DPR RI ke <i>The Annual Chatham House International Policy Forum on Gender Inclusive</i> tanggal 9-10 Juli 2018 di London, Inggris	3
12.	Delegasi DPR RI ke <i>United Nations High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development</i> tanggal 14 - 20 Juli 2018 di New York, Amerika Serikat	4
13.	Delegasi DPR RI ke <i>The 5<sup>th</sup> Open Government Partnership (OGP) Global Summit</i> tanggal 17-19 Juli 2018 di Tbilisi, Georgia	5

Masa Persidangan I Sidang 16 Agustus – 2 November 2018 Reses 5 November – 19 November 2018		
14.	Delegasi DPR RI ke <i>The 42<sup>th</sup> Sesssion of the Steering Committee (SC) of the Pariamentary Conference on the World Trade Organization (PCWTO)</i> tanggal 2 – 7 Oktober 2018 di Jenewa, Swiss	1
15.	Delegasi DPR RI ke <i>Meeting of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Global Parliamentary Network</i> tanggal 8 - 12 Oktober 2018 di Paris – Perancis	2
16.	Delegasi DPR RI ke <i>The 139<sup>th</sup> Assembly of the the Inter-Parliamentary United Nation and Delegasi DPR RI ke Related Meetings</i> tanggal 12-20 Oktober 2018 di Jenewa-Swiss	3
17.	Delegasi DPR RI ke <i>The 18<sup>th</sup> International Anti-Corruption Conference (IACC)</i> tanggal 22-26 Oktober 2018 di Kopenhagen, Denmark	4
18.	Delegasi BKSAP DPR RI untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs) dalam rangka Kunjungan Teknis ke Republik Kazakhstan tanggal 22-28 Oktober 2018	5
19.	Delegasi DPR RI ke <i>Parliamentary Speakers' Summit in the Context of the G20 Leaders' Summit</i> tanggal 29 Oktober – 4 November 2018 di Buenos Aires, Argentina	6
Masa Persidangan II Sidang 21 November – 13 Desember 2018 Reses 14 Desember 2017 – 7 Januari 2018		
20.	Delegasi DPR RI ke <i>The Women Political Leaders Global Forum (WPL) Annual Global Summit</i> tanggal 25-30 November 2018 di Reykjavic, Islandia	1
21.	Delegasi DPR RI ke <i>The 8<sup>th</sup> World e-Parliament Conference</i> tanggal 1-7 Desember 2018 di Jenewa, Swiss	2
22.	Delegasi DPR RI ke <i>The 2018 Annual Session of Parliemantary Conference on the WTO (PCWTO)</i> tanggal 4-9 Desember 2018 di Jenewa, Swiss	3
23.	Delegasi DPR RI ke <i>Parliamentary Meeting on Occasion of the Adoption of the Global Compact for Save, Orderly and Regular Migration</i> tanggal 4-9 Desember 2018 di Rabat, Maroko	4
24.	Delegasi DPR RI ke <i>The 24<sup>th</sup> Session of the Parties to the United Nations Convention on Climate Change (COP 24)</i> tanggal 7-11 Desember 2018 di Krakow, Polandia	5
25.	Delegasi DPR RI ke <i>The 2<sup>nd</sup> Conference of the League of Parliamentarians for Al Quds</i> tanggal 14-15 Desember 2018 di Istanbul, Turki	6
26.	Delegasi DPR RI ke <i>The 5th Young Parliamentarians of the Inter-Parliamentary Union (IPU)</i> tanggal 12-17 Desember 2018 di Baku, Azerbaijan	7

## Data Sidang ASGP SETJEN DPR RI

Masa Persidangan IV Sidang 5 Maret – 27 April 2018 Reses 28 April – 17 Mei 2018		
1.	Delegasi Setjen DPR RI ke <i>Sidang Associaton of Secretaries General</i> tanggal 22-29 Maret 2018 di Jenewa – Swiss	1
Masa Persidangan I Sidang 16 Agustus – 2 November 2018 Reses 5 November – 19 November 2018		
2.	Delegasi Setjen DPR RI ke <i>Sidang Associaton of Secretaries General</i> tanggal 12-20 Oktober 2018 di Jenewa-Swiss	1

## Data Kegiatan Sidang-sidang Internasional/Workshop/FGD dan lain-lain di Dalam Negeri Tahun 2018

Masa Persidangan IV Sidang 5 Maret – 27 April 2018 Reses 28 April – 17 Mei 2018		
1.	Kunjungan Teknis Panja BKSAP DPR RI untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tanggal 5 -7 Maret 2018 ke Provinsi Aceh	
2.	Penyelenggaraan <i>International Women's Day 2018</i> di Lobby Nusantara DPR RI tanggal 14 Maret 2018	
3.	Kunjungan Teknis Panja BKSAP DPR RI untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tanggal 4 – 6 April 2018 ke Provinsi Sulawesi Utara	
4.	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dalam rangka Persiapan Penyelenggaraan <i>The 2<sup>nd</sup> World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)</i> dengan Bappenas, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian ESDM pada tanggal 18 Mei 2018 di Gedung Nusantara III Lantai 2 DPR RI	
Masa Persidangan V Sidang 18 Mei – 28 Juli 2018 Reses 29 Juli – 15 Agustus 2018		
5.	<i>Embassy Briefing</i> dalam rangka penyelenggaraan <i>The 2<sup>nd</sup> World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)</i> dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Juli 2018 di Pustakaloka Gedung Nusantara IV Lantai 2	
Masa Persidangan I Sidang 16 Agustus – 2 November 2018 Reses 5 November – 19 November 2018		
6.	Penyelenggaraan <i>The 2<sup>nd</sup> World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)</i> tanggal 12-13 September 2018 di Nusa Dua - Bali	
7.	Penyelenggaraan <i>The 4<sup>th</sup> MIKTA Speakers Consultation</i> tanggal 15-17 September 2018 di Ubud – Bali	

## Data Kegiatan Sidang-sidang Regional Tahun 2018

<b>MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2017 – 2018</b> Masa Sidang Tanggal 9 Januari 2018 s/d 14 Februari 2018 Masa Reses Tanggal 15 Februari 2018 s/d 4 Maret 2018		
<b>1.</b>	The 26 <sup>th</sup> Annual Meeting of the Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) pada tanggal 17-21 Januari 2018 di Hanoi – Vietnam	<b>1</b>
<b>MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2017 – 2018</b> (Masa Sidang Tanggal 5 Maret 2018 s/d 27 April 2018 Masa Reses Tanggal 28 April 2018 s/d 17 Mei 2018)		
<b>2.</b>	Kunjungan Kerja Kerjasama Ekonomi Regional keluar negeri dalam rangka menindaklanjuti resolusi-resolusi AIPA ke Bucharest, Rumania tanggal 18-24 Maret 2018	<b>1</b>
<b>MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017 – 2018</b> (Masa Sidang Tanggal 18 Mei 2018 s/d 17 Juli 2018 Masa Reses Tanggal 18 Juli 2018 s/d 15 Agustus 2018)		
<b>3.</b>	Sidang the 1 <sup>th</sup> <i>Meeting of the AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD)</i> tanggal 18-21 Juni 2018, di Singapura	<b>1</b>
<b>4.</b>	Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) <i>Standing Committee on Economic and Sustainable Development</i> tanggal 26 Juni 2018, di Pissouri, Cyprus	<b>2</b>
<b>MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2017 – 2018</b> (Masa Sidang Tanggal 16 Agustus 2018 s/d 31 Oktober 2018 Masa Reses Tanggal 1 November 2018 s/d 20 November 2018)		
<b>5.</b>	Sidang Umum ke-39 AIPA tanggal 3 – 7 September 2018 di Singapura	<b>1</b>
<b>6.</b>	Sidang the 10 <sup>th</sup> <i>Asia Europe Parliamentary Partnership (ASEP)</i> tanggal 27 – 28 September 2018, Brussels, Belgia	<b>2</b>
<b>7.</b>	Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) <i>Standing Committee on Social and Cultural Affairs</i> dan Sidang Pertama <i>Executive Council</i> tanggal 4-6 Oktober 2018, Izmir, Turki	<b>3</b>
<b>8.</b>	Sidang <i>the 3<sup>rd</sup> Speakers of Eurasian Countries' Parliaments</i> tanggal 8-11 Oktober 2018, Antalya, Turki	<b>4</b>
<b>9.</b>	Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) <i>Standing Committee on Political Affairs</i> dan Sidang <i>Special Committee for Creation of Asian Parliament</i> tanggal 27 Oktober - 1 November 2018 di Gwadar, Pakistan	<b>5</b>
<b>MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2018 – 2019</b> (Masa Sidang Tanggal 21 November 2018 s/d 13 Desember 2018 Masa Reses Tanggal 14 Desember 2018 s/d 6 Januari 2019)		
<b>10.</b>	<i>The Second Executive Council Meeting and the 11th Plenary Session of Asian Parliamentary Assembly (APA)</i> pada tanggal 28 November – 3 Desember 2018 di Istanbul, Turki	<b>1</b>

## Data Kegiatan Sidang-sidang Internasional/Workshop/FGD dan lain-lain di Dalam Negeri Tahun 2018

<b>MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2017 – 2018</b> Masa Sidang Tanggal 9 Januari 2018 s/d 14 Februari 2018 Masa Reses Tanggal 15 Februari 2018 s/d 4 Maret 2018		
<b>1.</b>	Consultative Workshop on the State of Gender-Related Legislation and Participation of Women in the Parliamentary Process of AIPA Member Parliaments, tanggal 6 - 8 Februari 2018 di Gran Mahakam Hotel – Jakarta	<b>1</b>
<b>MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2017 – 2018</b> (Masa Sidang Tanggal 5 Maret 2018 s/d 27 April 2018 Masa Reses Tanggal 28 April 2018 s/d 17 Mei 2018)		
<b>2.</b>	BKSAP Day ke Universitas Diponegoro, Semarang, pada tanggal 6-8 Maret 2018	<b>1</b>
<b>3.</b>	Workshop Peran Parlemen dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Tinjauan Implementasi Konvensi PPB Anti Korupsi – UNCAC ( <i>United Nations Convention Againsts Corruption</i> ) pada tanggal 23 April 2018 di Jakarta	<b>2</b>
<b>MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017 – 2018</b> (Masa Sidang Tanggal 18 Mei 2018 s/d 17 Juli 2018 Masa Reses Tanggal 18 Juli 2018 s/d 15 Agustus 2018)		
<b>4.</b>	Pengiriman Delegasi DPR RI pada Penyelenggaraan Indonesia – Pacific Parliamentary Partnership on Human Development and Maritime Sustainability, tanggal 23 – 24 Juli 2018 di Grand Hyatt Jakarta	<b>1</b>
<b>MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2018 – 2019</b> (Masa Sidang Tanggal 21 November 2018 s/d 13 Desember 2018 Masa Reses Tanggal 14 Desember 2018 s/d 6 Januari 2019)		
<b>5.</b>	Penganugerahan AIPA <i>Distinguished Service Award</i> 2018 pada tanggal 13 Desember 2018	<b>1</b>

**REKAP KEGIATAN  
RAPAT-RAPAT KSB TAHUN 2018**

**COURTESYCALL/FRIENDLY TALK**

<b>MASA PERSIDANGAN III TANGGAL 9 JANUARI s.d. 14 FEBRUARI 2018</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
1	Senin, 8 Januari 2018	Pukul 11.00 WIB	Ketua BKSAP Hj. Nurhayati Assegaf menerima Dubes Iran Pembahasan terkait : 1. Dukungan Indonesia terhadap konflik yang terjadi di Iran 2. Rencana Sidang PUIC di Teheran dll.	Ruang Tamu Pimpinan BKSAP Lantai 4	1
2	Kamis, 18 Januari 2018	Pukul 11.00 WIB	Pertemuan dengan Dubes Maroko	Ruang Tamu Pimpinan Lantai 2	2
<b>MASA PERSIDANGAN IV TANGGAL 5 MARET s.d. 27 APRIL 2018 (MASA RESES 28 APRIL s.d. 17 MEI 2018)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
3	Senin, 5 Maret 2018	Pukul 11.00 WIB	Friendly Talk GKSB DPR RI – Parlemen Australia dengan Delegasi Partai Buruh Australia	Ruang Rapat Lantai 2, Nus 3	1.
4	Kamis, 8 Maret 2018	Pukul 11.30 WIB	Ketua BKSAP dan GKSB DPR RI – Parlemen Iran menerima Delegasi GKSB Iran	Ruang Tamu Pimpinan Lt. 2	2.
5	Kamis, 15 Maret 2018	Pukul 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Ketua BKSAP dengan Kementerian Keuangan dalam rangka Persiapan Parliamentary Forum (IMF di Bali 2018)	Ruang Kerja Ketua BKSAP Lt. 4	3.
6	Selasa, 27 Maret 2018	Pukul 10.00 WIB	GKSB DPR RI – Parlemen Belarusia menerima Dubes Belarusia	Ruang Tamu Pimpinan Lt. 2	4.
7	Selasa, 27 Maret 2018	Pukul 14.30 WIB	Pertemuan Wakil Ketua BKSAP dengan Dubes Meksiko	Di Kantor Dubes	5.
8	Senin, 8 April 2018	Pukul 15.00 WIB	GKSB DPR RI – Parlemen Meksiko menerima Dubes Meksiko	Ruang Tamu Pimpinan Lt. 2	6.
9	Senin, 30 April 2018	Pukul 13.00 WIB	Delegasi Azerbaijani Women	Ruang Tamu Pimpinan Lt. 2	7.
<b>MASA PERSIDANGAN V TANGGAL 18 MEI s.d. 27 JULI 2018 (MASA RESES 28 JULI s.d. 15 AGUSTUS 2018)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
10	Jumat, 18 Mei 2018	Pukul 14.00 WIB	Friendly Talk Pimpinan, Komisi I, Komisi II dan BKSAP DPR RI dengan Parlemen Kenya	Ruang Rapat Lantai 2, Nus 3	1.
11	Selasa, 31 Juli 2018	Pukul 15.00 WIB	Minister Keiichi ONO, Wakil Dubes	Ruang Tamu	2.

			Diterima oleh Bp Aryo Djojohadikusumo	Pimpinan Lt. 2	
<b>MASA PERSIDANGAN I 2018-2019</b> <b>TANGGAL 16 AGUSTUS 2018 s.d. 31 OKTOBER 2018</b> <b>(MASA RESES 1 NOVEMBER 2018 s.d. 18 NOVEMBER 2018)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
12	Jumat, 14 September 2018	Pukul 14.00 WIB	Pertemuan dengan Delegasi Setjen Parlemen Thailand	Ruang Rapat BKSAP Lt. 4	1.
13	Selasa, 9 Oktober 2018	Pukul 14.30 WIB	GKSB DPR RI – Parlemen Venezuela menerima Dubes Venezuela	Ruang Tamu Pimpinan Lt. 2	2.
14	Senin, 29 Oktober 2018	Pukul 12.00 WIB  Pukul 13.00 WIB	Lunch bersama TIPG (Thailand – Indonesia Parliamentarians Friendship Group dengan GKSB DPR RI-Parlemen Thailand  Pertemuan dengan GKSB DPR RI-Parlemen Thailand	Ruang makan lantai 2 Ruang terima tamu Dubes lantai 2	3.
15	Rabu, 31 Oktober 2018	Pukul 16.00 WIB	GKSB DPR RI – Parlemen Perancis menerima Kelompok Persahabatan Perancis-Indonesia		4.
<b>MASA PERSIDANGAN II 2018-2019</b> <b>TANGGAL 21 NOVEMBER 2018 s.d. 13 DESEMBER 2018</b> <b>(MASA RESES 14 DESEMBER 2018 s.d. 6 JANUARI 2019)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
16	10 Desember 2018	10.00	Pertemuan Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Kuwait dengan Kuasa Usaha Kedutaan Kuwait	Ruang Rapat Lt. 2, Nus. 3	1

**RAPIM BKSAP**

<b>MASA PERSIDANGAN III TANGGAL 9 JANUARI s.d. 14 FEBRUARI 2018</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
1	Selasa, 9 Januari 2018	Pukul 12.00 WIB	Rapat Pimpinan BKSAP acara : pembahasan program dan kegiatan BKSAP 2018	Ruang Rapat Pimpinan BKSAP Lantai 4	1
<b>MASA PERSIDANGAN IV TANGGAL 5 MARET s.d. 27 APRIL 2018 (MASA RESES 28 APRIL s.d. 17 MEI 2018)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
2	Kamis, 8 Maret 2018	Pukul 14.00 WIB	Rapat Pimpinan BKSAP	Ruang Rapat BKSAP	2
4	Senin, 23 April 2018	Pukul 14.00 WIB	Rapat Pimpinan BKSAP	Ruang Rapat BKSAP	BATAL
<b>MASA PERSIDANGAN V TANGGAL 18 MEI s.d. 27 JULI 2018 (MASA RESES 28 JULI s.d. 15 AGUSTUS 2018)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
			Tidak ada Rapat Pimpinan BKSAP		
<b>MASA PERSIDANGAN I 2018-2019 TANGGAL 16 AGUSTUS 2018 s.d. 31 OKTOBER 2018 (MASA RESES 1 NOVEMBER 2018 s.d. 18 NOVEMBER 2018)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
5	Kamis, 16 Agustus 2018	Pukul 11.30 WIB	Rapat Pimpinan BKSAP	Ruang Rapat BKSAP Lt. 4	5
6	22 Oktober 2018	Pukul 10.00 WIB	Rapat Pimpinan BKSAP	Ruang Rapat BKSAP Lt. 4	6
<b>MASA PERSIDANGAN II 2018-2019 TANGGAL 21 NOVEMBER 2018 s.d. 13 DESEMBER 2018 (MASA RESES 14 DESEMBER 2018 s.d. 6 JANUARI 2019)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
7	11 Desember 2018	Pukul 11.00 WIB	Rapat Pimpinan BKSAP	Ruang Rapat BKSAP Lt. 4	7

**PLENO BKSAP**

<b>MASA PERSIDANGAN III</b>					
<b>TANGGAL 9 JANUARI s.d. 14 FEBRUARI 2018</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
1	Rabu, 24 Januari 2018	Pukul 11.00 WIB	Rapat Pleno BKSAP : Pengesahan Pergantian Pimpinan semula Syaifullah Tamliha diganti oleh Hj. Nurhayati	Ruang Rapat BKSAP Lantai 4	1
<b>MASA PERSIDANGAN IV</b>					
<b>TANGGAL 5 MARET s.d. 27 APRIL 2018</b>					
<b>(MASA RESES 28 APRIL s.d. 17 MEI 2018)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
			Tidak ada Rapat Pleno BKSAP		
<b>MASA PERSIDANGAN V</b>					
<b>TANGGAL 18 MEI s.d. 27 JULI 2018</b>					
<b>(MASA RESES 28 JULI s.d. 15 AGUSTUS 2018)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
2	Senin, 4 Juni 2018	Pukul 13.00 WIB	Rapat Pleno BKSAP (Pengesahan Pak Hasru Azwar)	Ruang Rapat BKSAP Lt. 4	(TUNDA)
3	Rabu, 25 Juli 2018	Pukul 13.00 WIB	Rapat Pleno BKSAP (Pengesahan Pak Hasrul Azwar dan Pak Fadel Muhammad sbg Pimpinan BKSAP)	Ruang Rapat BKSAP Lt. 4	3
<b>MASA PERSIDANGAN I 2018-2019</b>					
<b>TANGGAL 16 AGUSTUS 2018 s.d. 31 OKTOBER 2018</b>					
<b>(MASA RESES 1 NOVEMBER 2018 s.d. 18 NOVEMBER 2018)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
			Tidak ada Rapat Pleno BKSAP DPR RI		
<b>MASA PERSIDANGAN II 2018-2019</b>					
<b>TANGGAL 21 NOVEMBER 2018 s.d. 13 DESEMBER 2018</b>					
<b>(MASA RESES 14 DESEMBER 2018 s.d. 6 JANUARI 2019)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
4	Rabu, 21 November 2018	Pukul 12.30 WIB	Rapat Pleno BKSAP (pengesahan Dave Laksono sebagai Wakil Ketua BKSAP menggantikan Fadel Muhammad)	Ruang Rapat BKSAP Lt. 4	4

**INTERN GKSB**

<b>MASA PERSIDANGAN III TANGGAL 9 JANUARI s.d. 14 FEBRUARI 2018</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
1	Selasa, 9 Januari 2018	Pukul 15.00 WIB	Rapat Intern GKSB Belarusia dan penetapan Pimpinan GKSB Belarusia	Ruang Rapat BKSAP Lantai 4	1
2	Rabu, 17 Januari 2018	Pukul 11.00 WIB	Rapat Koordinasi tim advance kedutaan Jepang dengan Protokol dan Pers dalam rangka kunjungan delegasi utusan Menteri Jepang yang dipimpin oleh Mr. Toshihiro Nikai.	Ruang Tamu Pimpinan Lantai 4	2
3	Kamis, 18 Januari 2018	Pukul 10.00 WIB	Rapat Intern GKSB DPR RI – Parlemen Senegal : membahas program kerja Kunjungan delegasi	Ruang Rapat BKSAP Lantai 4	3
4	Kamis, 18 Januari 2018	Pukul 10.00 WIB	Rapat Intern Delegasi Teknis Maroko : Membahas Program Kerja Delegasi Teknis BKSAP DPR RI	Ruang Tamu Pimpinan Lantai 2	4
5	Rabu, 24 Januari 2018	Pukul 11.00 WIB	Rapat Intern GKSB DPR RI – Pelemen Uni Eropa : Membahas rencana Kunjungan GKSB	Ruang Rapat Pimpinan BKSAP Lantai 4	5
6	Senin, 5 Februari 2018	Pukul 11.00 WIB	Rapat Intern GKSB DPR RI – Pelemen Uni Eropa : Membahas rencana Kunjungan GKSB	Ruang Rapat Pimpinan BKSAP Lantai 4	6
<b>MASA PERSIDANGAN IV TANGGAL 5 MARET s.d. 27 APRIL 2018 (MASA RESES 28 APRIL s.d. 17 MEI 2018)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
7	Rabu, 7 Maret 2018	Pukul 11.00 WIB	Rapat Intern GKSB DPR RI – Parlemen Portugal	Ruang Rapat BKSAP Lt. 4	1.
8	Senin, 12 Maret 2018	Pukul 11.00 WIB	Rapat Intern GKSB DPR RI – Parlemen Korea Selatan	Ruang Rapat BKSAP Lt. 4	2.
9	Kamis, 15 Maret 2018	Pukul 11.00 WIB	Rapat Intern GKSB DPR RI – Parlemen Ceko	Ruang Rapat BKSAP Lt. 4	3.
10	Senin, 2 April 2018	Pukul 14.00 WIB	Rapat GKSB Uni Eropa dengan Menteri Perdagangan RI	Kantor Menteri Perdagangan	4.
11	Kamis, 18 April 2018		Rapat Intern GKSB DPR RI – Parlemen Lithuania	Ruang Rapat BKSAP Lt. 4	5.

**MASA PERSIDANGAN V**  
**TANGGAL 18 MEI s.d. 27 JULI 2018**  
**(MASA RESES 28 JULI s.d. 15 AGUSTUS 2018)**

No.	HARI/TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN RAPAT	TEMPAT	
12	Rabu, 6 Juni 2018	Pukul 11.00 WIB	Rapat Intern GKSB DPR RI – Parlemen Portugal	Ruang Tamu Pimpinan Lt. 2	1
13	Kamis, 28 Juni 2018	Pukul 09.30 WIB	Rapat Intern GKSB DPR RI – Parlemen Senegal	Ruang Rapat Pimpinan BKSAP	2

**MASA PERSIDANGAN I 2018-2019**  
**TANGGAL 16 AGUSTUS 2018 s.d. 31 OKTOBER 2018**  
**(MASA RESES 1 NOVEMBER 2018 s.d. 18 NOVEMBER 2018)**

No.	HARI/TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN RAPAT	TEMPAT	
14	Selasa, 28 Agustus 2018	Pukul 11.00 WIB	Rapat Intern GKSB DPR RI – Parlemen Belarusia	Ruang Rapat BKSAP Lt. 4	1

**MASA PERSIDANGAN II 2018-2019**  
**TANGGAL 21 NOVEMBER 2018 s.d. 13 DESEMBER 2018**  
**(MASA RESES 14 DESEMBER 2018 s.d. 6 JANUARI 2019)**

No.	HARI/TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN RAPAT	TEMPAT	
			Tidak ada Rapat Intern GKSB		

**KUNJUNGAN TEKNIS BKSAP**

<b>MASA PERSIDANGAN III</b>					
<b>TANGGAL 9 JANUARI s.d. 14 FEBRUARI 2018</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
1	29 Januari – 4 Februari 2018		Kunjungan Teknis BKSAP DPR RI ke Maroko	Ketua Delegasi : Siti Hediati Soeharto	1
<b>MASA PERSIDANGAN IV</b>					
<b>TANGGAL 5 MARET s.d. 27 APRIL 2018</b>					
<b>(MASA RESES 28 APRIL s.d. 17 MEI 2018)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
2	Senin-Kamis 9-15 April 2018		Kunjungan Teknis BKSAP DPR RI ke Kroasia	Ket.: Rofi Munawar	1
3	Sabtu-Jumat 14-20 April 2018		Kunjungan Teknis BKSAP DPR RI – Parlemen Meksiko	Ket : Juliari Batubara	2
<b>MASA PERSIDANGAN V</b>					
<b>TANGGAL 18 MEI s.d. 27 JULI 2018</b>					
<b>(MASA RESES 28 JULI s.d. 15 AGUSTUS 2018)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
			Tidak ada Kunjungan Teknis BKSAP		
<b>MASA PERSIDANGAN I 2018-2019</b>					
<b>TANGGAL 16 AGUSTUS 2018 s.d. 31 OKTOBER 2018</b>					
<b>(MASA RESES 1 NOVEMBER 2018 s.d. 18 NOVEMBER 2018)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
4	16 – 22 Agustus 2018		Kunjungan Teknis BKSAP DPR RI ke Papua Nugini	Ketua Delegasi : Nurhayati Ali A.	1
5	18 – 24 September 2018		Kunjungan Teknis BKSAP DPR RI ke Ekuador	Ketua Delegasi : Nurhayati Ali A.	2
6	15 – 21 Oktober 2018		Kunjungan Teknis BKSAP DPR RI ke Kroasia	Ketua Delegasi : Juliari Batubara	3
7	29 Oktober – 4 November 2018		Kunjungan Teknis BKSAP DPR RI ke Chile	Ketua Delegasi : Rofi’Munawar	4

**MASA PERSIDANGAN II 2018-2019**  
**TANGGAL 21 NOVEMBER 2018 s.d. 13 DESEMBER 2018**  
**(MASA RESES 14 DESEMBER 2018 s.d. 6 JANUARI 2019)**

No.	HARI/TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN RAPAT	TEMPAT
8	17– 22 November 2018		Kunjungan Teknis BKSAP DPR RI ke Yunani	Ketua Delegasi : Nurhayati Ali A. 1
9	24 – 28 November 2018		Kunjungan Teknis BKSAP DPR RI ke Kroasia	Ketua Delegasi : Rofi’Munawar 2
10	12 – 18 Desember 2018		Kunjungan Teknis BKSAP DPR RI Ke Saudi Arabia	Ketua Delegasi Pak Hasrul 3
11	14 – 19 Desember 2018		Kunjungan Teknis BKSAP DPR RI ke Jordan	Ketua Delegasi : Pak Juliari 4

**KUNJUNGAN GKSB**

<b>MASA PERSIDANGAN III</b>					
<b>TANGGAL 9 JANUARI s.d. 14 FEBRUARI 2018</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
			Belum ada Kunjungan GKSB		
<b>MASA PERSIDANGAN IV</b>					
<b>TANGGAL 5 MARET s.d. 27 APRIL 2018</b>					
<b>(MASA RESES 28 APRIL s.d. 17 MEI 2018)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
1	Sabtu-Jumat 17 – 23 Maret 2018		Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Korea Selatan		1
2	Sabtu-Jumat 7-13 April 2018		Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Uni Eropa		2
3	Sabtu-Jumat 21-27 April 2018		Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Lithuania		3
<b>MASA PERSIDANGAN V</b>					
<b>TANGGAL 18 MEI s.d. 27 JULI 2018</b>					
<b>(MASA RESES 28 JULI s.d. 15 AGUSTUS 2018)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
4	21 – 27 Juli 2018		Kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen Senegal ke Dakar	Ketua Delegasi : Yayat Biaro	1
<b>MASA PERSIDANGAN I 2018-2019</b>					
<b>TANGGAL 16 AGUSTUS 2018 s.d. 31 OKTOBER 2018</b>					
<b>(MASA RESES 1 NOVEMBER 2018 s.d. 18 NOVEMBER 2018)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
5	15 – 21 September 2018		Kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen Belarusia ke Belarusia	Ketua Delegasi : dr. Adang Sudrajat	1
6	27 September – 2 Oktober 2018		Kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen Ceko ke Praha	Ketua Delegasi : Zulfan Lindan	2
<b>MASA PERSIDANGAN II 2018-2019</b>					
<b>TANGGAL 21 NOVEMBER 2018 s.d. 13 DESEMBER 2018</b>					
<b>(MASA RESES 14 DESEMBER 2018 s.d. 6 JANUARI 2019)</b>					
<b>No.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KEGIATAN RAPAT</b>	<b>TEMPAT</b>	
7	22 – 30 November 2018		Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Venezuela ke Venezuela	Ketua Delegasi : Moh. Hekal	1

## Data Kegiatan Alih Bahasa Lisan dan Tertulis Tahun 2018

Masa Persidangan III Sidang 10 Januari – 24 Feb 2017 Reses 25 Feb – 14 Maret 2017		
1.	Terjemahan Lisan (Bahasa Inggris) Penerimaan tamu dari negara-negara sahabat	18
2.	Terjemahan tertulis Bahasa Inggris dan V.V : 1. TOR : 10 2. Pidato : 10 3. Surat menyurat: 61 4. CV : 10 5. Resolusi: 15 6. Makalah Seminar : 5 7. Website : 6	117
Masa Persidangan IV Sidang 15 Maret – 28 April 2017 Reses 29 April – 17 Mei 2017		
1.	Terjemahan Lisan Bahasa Inggris	23
2.	Terjemahan Lisan Bahasa Arab	3
3.	Terjemahan Tertulis Bahasa Inggris dan V.V: 1. TOR : 13 2. Surat-menyurat : 58 3. Resolusi: 10 4. CV: 13 5. Pidato: 3 6. Website : 6 7. MoU : 1	104
Masa Persidangan V Sidang 18 Mei – 27 Juli 2017 Reses 28 Juli – 15 Agustus 2017		
1.	Terjemahan Lisan Bahasa Inggris	19
2.	Terjemahan Lisan Bahasa Arab	1
3.	Terjemahan tertulis Bahasa Inggris dan V.V 1. TOR : 20 2. Surat-menyurat: 43 3. Resolusi : 10 4. Makalah: 5 5. Website : 6 6. CV: 20	104
Masa Persidangan I Sidang 16 Agustus – 27 Oktober 2017 Reses 28 Oktober – 14 November 2017		
1.	Terjemahan Lisan Bahasa Inggris	20

2.	Terjemahan Bahasa Isyarat	1
3.	Terjemahan tertulis Bahasa Inggris: 1. TOR: 10 2. Surat-menyurat: 69 3. Resolusi: 10 4. Pidato : 10 5. Website: 6	105
4.	Terjemahan Tertulis Bahasa Thailand	1
<b>Masa Persidangan II</b> <b>Sidang 15 November – 13 Desember 2017</b> <b>Reses 14 Desember 2017 – 8 Januari 2018</b>		
1.	Terjemahan Lisan Bahasa Inggris	22
2.	Terjemahan Lisan Bahasa Arab	4
3.	Terjemahan tertulis Bahasa Inggris dan V.V 1. TOR: 12 2. Surat-menyurat:70 3. CV: 30 4. Pidato : 3 5. Resolusi: 10 6. Website: 6	121
4.	Terjemahan tertulis Bahasa Arab dan V.V	5

**MATRIKS KUNJUNGAN INDIVIDU KE LUAR NEGERI  
BAGIAN SET. MINLUNA TAHUN ANGGARAN 2018**

MATRIKS KUNJUNGAN INDIVIDU KE LUAR NEGERI DARI MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2017-2018 TGL. 9 JANUARI S/D 4 MARET 2018						
NO	NEGARA	JUMLAH KUNJUNGAN	JUMLAH ORANG	FRAKSI-FRAKSI	TGL. KEPERGIAN	KET
1	Ceko	1	17	F-P GOLKAR	5-11 Februari 2018	Boby Adhityo Rizaldi, SE, AK, MBA, CFE
						H. Muhidin M Said, SE, MBA
						Drs. H. Gatot Sudjito M, Si
						Drs. Dadang S. Muchtar
						Hj. Saniatul Lativa, SE, MM
						Venny Devianti, S.Sos
						Ichsan Firdaus
						Ir. Ridwan Bae
						Ridwan Hisyam
						Bambang Atmanto Wiyogo
						Ir. H. Ahmadi Noor Supit
						Ferdiansyah, SE, MM
						Lili Asdjudiredja
						Gde Sumarjaya Linggih, SE, M.AP
						H. Andi Achmad Dara, SE
						A.A Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H
						M. Sarmuji, SE., M.Si
2	Papua Nugini	1	1	F-P Hanura	26 Feb-3 Maret 2018	Dr. H.M. Fariz Al Fauzi

Matriks Kunjungan Individu ke Luar Negeri						
Dari Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018						
Tgl. 5 Maret s/d 17 Mei 2018						
NO	NEGARA	JUMLAH KUNJUNGAN	JUMLAH ORANG	FRAKSI-FRAKSI	TGL. KEPERGIAN	KET
1	Chile	1	2	F-PDI Perjuangan	5-11 Maret 2018	Evita Nursanty
						Andreas Hugo Pareira
			1	F-P Golkar		Meutya Viada Hafid
			2	F-PD		Darizal Basir
						Ir. H. Hari Kartana, MM
2	PNG	1	1	F-PKB	6-12 Maret 2018	Bertus Merlas, ST
			1	F-P Hanura		Fauzih Amro, M.Si
3	Suriah	1	1	F-P Nasdem	9-15 Maret 2018	Drs. T. Taufiqulhadi, M.Si
4	Swiss	1	4	F-PKS	10-16 Maret 2018	H.M. Nasir Djamil, M.Si
						H. Sutriyono, Spd., M.Si
						Tamsil Linrung
						H.M. Yudi Kotouky
5	Ekuador	2	1	F-P Nasdem	11-17 Maret 2018	Prof DR. Bachtiar Aly, MA
			1	F-P Hanura	26 Maret - 1 April 2018	DR.Hot Rufinus Hotmaulana
						Hutauruk, SH., MM, MH
6	Usbekistan	1	1	F-P GOLKAR	2-8 April 2018	Dra. Hj. Popong Otje Djundjungan
7	Ceko	2	4	F-PAN	15-21 April 2018	Budi Youyastri
						HJ. Dewi Coryati, M.Si
						Haerudin, S.Ag., M.H
						Ahmad Najib Qodratullah, SE
			3	HANURA		Samsudin Siregar, SH
						Moh. Arief S. Suditomo, SH, MA
						H. Lalu Gede Syamsul Mujahidin, SE.,
			4	F-PD	19-25 April 2018	Dr. Ir. H. Bahrum Daido, M.Si
						Tutik Kusuma Wardhani, SE, MM,M.Kes
						HJ. Aliyah Mustika Ilham, SE
						H. Mat Nasir, S.Sos

			11	F-P NASDEM		Johnny G. Plate, SE Drs, Tamanuri M.M Drs. Muchtar Luthfy A.M, M.Si DR. Kurtubi, S.E., M.Sp., M.Sc Drs, H. Nyat Kadir H. Syarief Abdullah Alkadrie, SH,MH Hamdhani, S.Ip., M.Sos Kresna Dewanata Phrosakh, SH Donny Imam Priambodo Dr. Achmad Hatari, SE, M.Si Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries S
8	Brazil	2	1	F-PKS	20-26 April 2018	Dr. H. Mardani, M.Eng
9	Jerman	1	1	F-PDI Perjuangan	5 - 11 Mei 2018	H. Hamka Haq

Matriks Kunjungan Individu ke Luar Negeri							
Dari Masa Sidang V Tahun Sidang 2017-2018							
TGL. 18 5 Mei s/d 16 Agustus 2018							
NO	NEGARA	JMH KUNJUNGAN	JMH ORANG	FRAKSI-FRAKSI	TGL. KEPERGIAN	KET	
1	Rusia	2	1	Golkar	1-7 Agustus 2018	Eka Sastra, SE., M.Si	
			1	Golkar	13 - 19 Juli 2018	Budiman Sudjatmiko	
2	PNG	3	6	Gerindra	18 - 24 Mei 2018	Hj. Sri Wulan, SE Rita Zahara Bambang Riyanto, SH Khilmi Roberth Rouw Ir. H. Harry Poernomo	
				Golkar			
				Nasdem			
			2	Demokrat		16 - 22 Juli 2018	Putu Supadma Rudana, MBA Dr. Michael Wattimena, SE, MM
3	Ukraina	1	1	Hanura		25 Juni - 1 Juli 2018	Drs. Sudiro Asno, Ak
4	Jepang	1	1	F-PKB	22-28 Juni 2018	Ir. H.A. Helmy Fashal Zaini	

5	Brazil	1	1	PDI-Perjuangan	8 - 14 Juli 2018	Itet Tridjati Sumarijanto
			1	PKB		Dra. Hj. Lilis Santika
6	Kroasia	1	2	PKS	26 Juli - 1 Agustus 2018	drh. Slamet

Matriks Kunjungan Individu ke Luar Negeri						
Dari Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019						
Tgl. 16 Agustus s/d 31 Oktober 2018						
NO	NEGARA	JMH KUNJUNGAN	JMH ORANG	FRAKSI-FRAKSI	TGL. KEPERGIAN	KET
1	PNG	1	1	Hanura	15 - 21 Sept'18	Mukhtar Tompo, S.Psi
2	Kroasia	1	7	Gerindra	12 - 20 Okt'18	Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
						DR. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc
						Heri Gunawan, SE
						Ir.H. Bambang Haryo Soekartono
						Drs. Supriyanto
						G. Budisatrio Djiwandono
						dr. Felicitas Tallulembang
3	Afrika Selatan	1	6	PDI-Perjuangan	27 Agus - 2 Sept'18	I Gusti Agun Rai Wirajaya
						Muhamad Prakosa
						Indah Kurnia
						Andreas Eddy Susetyo
						Erwin TPL. Tobing
						DR. Dewi Aryani, M.Si
						Mercy Christy Barends
4	Yunani	1	4	Gerindra	17 - 23 Agustus 2018	Ir. Sri Meliyana
						Ir. Nuroji
						Jamal Mirdad
						.H.R Muhammad Syafi'i, SH., M.Hum
5	USA	1	1	PDI-Perjuangan	24 - 30 Sept 2018	Dr. Ir. H. Zuhdi Yahya
6	Australia	1	2	PAN	27 Sept - 2 Okt 2018	H. MHD Asli Chaidir, SH
				PPP		KH. Muslich

**MATRIKS KUNJUNGAN INDIVIDU KE LUAR NEGERI**

**DARI MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2018-2019**

**BULAN 21 NOVEMBER - 16 DESEMBER 2018**

NO	NEGARA	JMH KUNJUNGAN	JMH ORANG	FRAKSI	TGL. KEPERGIAN	NAMA ANGGOTA
1	PNG	1	2	PDI-P	19 - 25 Nov'18	Abidin Fikri
						Nurmansyah Efendi Tanjung
2	Kazakhstan	1	4	PKB	22 - 28 Nov' 2018	H. An'im Falachuddin Mahrus
						Drs. H. Bisri Romli
						Dr. Zainul Arifin Noor, SE., MM
						H. Dedi Wahidi
3	Ekuador	1	2	PD	3 - 9 Des'18	H. Syofwatillah Mohzaib, S.Sos,I
						Ir. H. Nanang Samodra KA., M.Sc
4	Inggris	1	1	Hanura	25 Nov - 1 Des'2018	H. Inas Nasrullah Zubir, BE., SE
5	Belanda	1	5	PAN	5 - 11 Des 2018	Viva Yoga Mauladi, M.Si
						Eko Hendro Purnomo, S.Sos
						M. Irwan Zulfikar, MBA
						H.A. Hanafi Rais, SIP., MPP
						H. Muhammad Hanafi, S.Sos
			Gerindra			Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, MM
			PDI-P			Sudin SE
			PDI-P		Erwin Moeslimin Singajuru	
4	Filipina	1	1	Gerindra	10 -16 Des'18	Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH.,MH

**BIRO KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN**  
SETJEN & BK DPR RI  
TAHUN 2019

Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan - Jakarta 10270  
Tel: +6221-5715814 | Fax: +6221-5732132  
Email: [biro\\_ksap@dpr.go.id](mailto:biro_ksap@dpr.go.id)

 BKSAP DPR RI

 @bksapdpri

 @bksapdpri

 BKSAP DPR RI